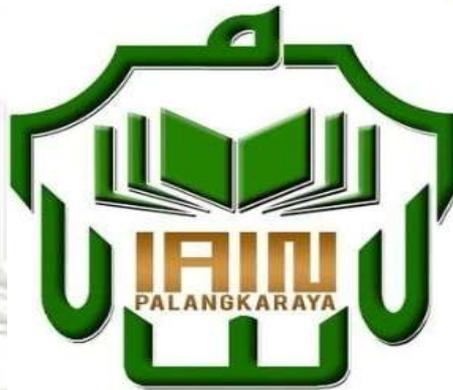


**IMPLEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM DI
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

RINDU LUK LUUL MAKMUNATUNNISAK
NIM: 1604110063

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2020/1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM DI KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : RINDU LUK LUUL MAKMUNATUNNISAK

NIM : 160 411 0063

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya... September 2020

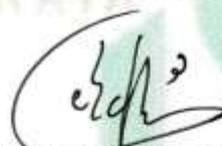
Menyetujui

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, M. Hum
NIP. 197506202003121003

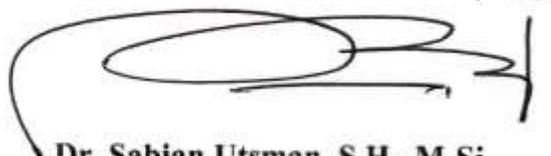
Pembimbing II



Fadiah Adlina, M Pd. I
NIP. 19910128 2018091022

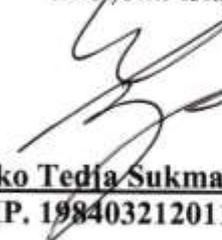
Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Rindu Luk Luul
Makmunatunnisak

Palangka Raya September 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **RINDU LUK LUUL MAKMUNATUNNISAK**
Nim : **1604110063**
Judul : **IMPLEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, M. Hum
NIP. 19750620 200312 1 003

Pembimbing II



Fadiyah Adlina, M. Pd. I
NIP. 19910128 201809 1 022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA**, oleh Rindu Luk Luul Makmunatunnisak, Nim :1604110063 telah di *munaqasahkan* Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

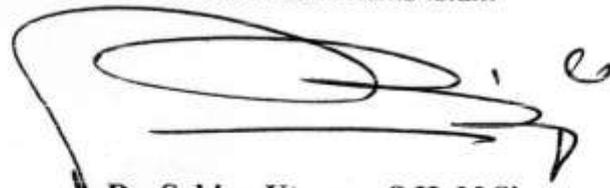
Tanggal : 16 September 2020

Palangka Raya September 2020

Tim Penguji

1. **Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum**
(Ketua Sidang/Penguji) 
2. **Jelita, M.S.I**
(Penguji I) 
3. **M. Zainal Arifin, M. Hum**
(Penguji II) 
4. **Fadiyah Adlina M. Pd.I**
(Sekretaris/Penguji) 

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP.19631109 199203 1004

IMPLEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: RINDU LUK LUUL MAKMUNATUNNISAK

NIM: 1604110063

Melihat kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah khususnya UMKM Kota Palangka Raya yang semakin berkembang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing pelaku usaha yang ditempuh salah satunya melalui pemberian bantuan teknis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai :pertama, apa saja bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya? Kedua, bagaimana implementasi bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Subjek penelitian ini adalah pegawai KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan empat komponen: yaitu pengumpulan data, merangkum data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, bantuan teknis yang diberikan KPw Bank Indonesia Prov Kal-Teng kepada UMKM berupa a) penelitian dilakukan oleh Bank Indonesia maupun bekerja sama antar kementerian/dinas/lembaga domestik maupun internasional, b) Pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik, website Bank Indonesia, sosialisasi/ *workshop*/ seminar, c) Pelatihan, dapat diberikan dalam bentuk klasikal, studi banding dan magang serta demplot, d) Pendampingan, kegiatan bimbingan kepada anggota klaster pangan selama periode tertentu e) Fasilitasi berupa akses legalitas, teknologi, akses pasar dan keuangan dan mewajibkan pembiayaan perbankan umum kepada UMKM sebesar 20%. Kedua, hasil dari implementasi bantuan teknis dan kewajiban pemberian pembiayaan memiliki tahapan-tahapan berupa pengeluaran kebijakan, derajat perubahan, pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Teknis, Bank Indonesia, UMKM.

**IMPLEMENTATION OF TECHNICAL ASSISTANCE
IN THE BANK INDONESIA REPRESENTATIVE OFFICE IN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE TO UMKM IN THE CITY OF
PALANGKA RAYA**

ABSTRACT

By RINDU LUK LUUL MAKMUNATUNNISAK
NIM: 1604110063

Seeing the economic conditions in Central Kalimantan, especially the UMKM of Palangka Raya City, the efforts made by the Representative Office (KPw) of Bank Indonesia of Central Kalimantan Province to improve financial access and competitiveness of business actors were one of them through the provision of technical assistance. Based on this background, the problems raised in this study are regarding: first, what are the forms of technical assistance provided by the KPw Bank Indonesia Central Kalimantan Province to UMKM in Palangka Raya City? Second, how is the implementation of technical assistance by KPw Bank Indonesia Central Kalimantan Province to UMKM in Palangka Raya City.

This research uses the type of field research. The subjects of this study were employees of KPw Bank Indonesia, Central Kalimantan Province. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. Data validation used source triangulation technique. Data analysis used four components: data collection, data summarization, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study are: First, technical assistance provided by Bank Indonesia to UMKM in the form of a) research conducted by Bank Indonesia and in collaboration between domestic and international ministries / agencies / institutions, b) Providing information in the form of printed media, electronic media, the Bank's website Indonesia, socialization / workshops / seminars, c) Training, can be given in the form of classical, comparative studies and apprenticeships and demonstration plots, d) Assistance, guidance activities for members of the food cluster during a certain period e) Facilitation in the form of legality access, technology, market access and finance and requires general banking financing to UMKM of 20%. Second, the results of the implementation of technical assistance and the obligation to provide financing have stages in the form of policy development, degrees of change, program implementation process.

Keywords : *Implementation, Technical Assistance, Bank Indonesia, UMKM.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pemberi nikmat dan hidayah. Doa kesejahteraan dan keselamatan senantiasa dihaturkan bagi Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan kaum muslimin. Dari bulan-kebulan peneliti mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena skripsi dengan judul “**Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kepada UMKM di Kota Palangka Raya**”. Telah terselesaikan, meski dalam proses penelitian serta penyusunan menghadapi berbagai hambatan dan rintangan.

Skripsi ini merupakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi. Melakukan sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Pembahasannya mengenai bantuan teknis yang sudah banyak dibahas dalam buku-buku dan tulisan penelitian. Namun pada skripsi ini di bahas mengenai implemtasi bantuan teknis yang diberikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ikut serta terlibat kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya
3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, M.SI Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya
4. Bapak M. Zainal Arifin, M. Hum sebagai dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi I dan Ibu Fadiah Adlina M. Pd. I sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.
6. Ayah dan ibu peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga terselesaikanya skripsi. Demikian juga untuk semua keluarga peneliti yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
7. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh staf pegawai KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang dengan sabar dan ikhlas membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Semua sahabat setia yang banyak memberikan bantuan dan perhatian kepada peneliti.

10. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti sadari sepenuhnya dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Kepada para pembaca dan para pakar pada skripsi ini peneliti mengharap teguran dan kritik konstruktif yang akan diterima dengan senang hati. Akhirnya peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam membuat skripsi ini semoga mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi kebanggaan untuk almamater sebagai bukti pengabdian peneliti. *Âmîn ya Rabb al-'âlamîn.*

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, September 2020

Peneliti,

Rindu Luk Luul Makmunatunnisak
NIM. 1604110063

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindu Luk Luul Makmunatunnisak

Nim : 1604110063

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“IMPEMENTASI BANTUAN TEKNIS KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPADA UMKM KOTA PALANGKA RAYA”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya September 2020

Yang membuat pernyataan



Rindu Luk Luul Makmunatunnisak

NIM: 1604110063

MOTTO

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ
مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رواه البخاري

Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: " Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat".(HR.Bukhari)

PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang Segala Puji Bagi Allah Yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala makhluk. Bersyukurlah atas segala anugerah dan rahmat yang diberikan Allah. Doa kesejahteraan dan keselamatan senantiasa terucap bagi Baginda Nabi Muhammad SAW, Kemudian semoga keridhaan Allah tercurah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina 'Ali, Juga Keluarga, Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in, ahli Taqwa, orang yang berlemah lembut, para penyantun dan orang dermawan.

Teruntuk guru-guruku, dosen pembimbing, dan seluruh pengajar di IAIN Palangka Raya semoga ilmu yang kau berikan akan menjadi ladang amal jariah yang terus mengalirkan keberkahan dan pahla untukmu. Dan bagiku semoga dapat bermanfaat senantiasa bisa mengamalkannya dengan penuh khidmad.

Teruntuk kedua orang tuaku Abah Bambang Harianto dan Umii Arofah, kupersembahkan karya ini untuk kalian yang tak pernah lelah mendoakanku. Alaram pengingat yang menggugah semangat dan yang memberikan segalanya untukku. Kadang air mata menjadi pelipur lara, Tidak ada cinta yang pantas untuk dicintai selain cinta itu sendiri.

Teruntuk sudaraku Riyang Luk Luul Habibi bersama keluarga kecilnya yang tersayang, kaka yang juga menemaniku serta kedua orangtuaku, yang memiliki sayang dan ikatan batin yang sama denganku kupersembahkan karya ini untukmu, semoga Allah menjadikan ilmu ini fangsurna alal kaumi jahilin, fangsurna alal kaumi munafiqiin, fangsurna alal kaumi dholimin dan semoga kelak kelurga kita dapat berkumpul didalam surga-Nya Allah.

Teruntuk sahabat jauhku yang terkasih selalu setia menemani didalam keadaan apapun Ahmad Hanafi Ashofa S.Pd, selama menjalankan skripsi senantiasa menasehatiku dari jauh, mendoakanku dan memberi semangat, kupersembahkan karya ini untukmu sebagai hasil akhirku berproses selama ini. Semoga aku bisa menjadi bijak dan sukses seperti teladanmu.

Teruntuk sahabat-sahabatku amin, anggit, livia, ica, uul yang tersayang, dari awal semester hingga akhir, yang mau kurepotkan segala hal, yang menjadi awal dan akhir sebuah perjalanan panjang, tempat berbagi mengadu dan numpang wifi, tempat terbaik belajar berbagi dan memahami sebuah perbedaan. Tidak ada permusuhan yang pantas dimusuhi kecuali musuh itu sendiri. Dan teruntuk teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016 Semoga kita menjadi sukses, bahagia dan berhasil pada waktunya.

Teruntuk teman-teman organisasiku Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Senat Mahasiswa (SEMA) FEBI, Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Generasi Baru Indonesia (GenBI), disinilah aku terjatuh, terbentur lalu terbetuk. Membuatku memahami belajar tidak hanya terbatas pada ruang, meja, dan buku, pentingnya pengalaman adalah guru terbaik. Adapun gelar sarjana ini adalah simbol kelulusanku ilmu dan pengalamanku adalah isinya. Namun apalah diri ini yang terus memiliki kekurangan dan selalu haus akan ilmu. Semoga organisasiku selalu berkiprah mencetak generasi-generasi yang kritis transformatif dan unggul dari segala bidang dengan menanamkan nilai-nilai keislaman.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah

		.	
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna - Fa aufūl-kaila wal-mīzāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرسَاهَا	- : Bismillāhi majrīhā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۗ	: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahrū Ramad}āna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'anū

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: Lillāhi al-amru jamī'ar L i l l ā h i a m r u j a m ī ' a

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	13
1. Bantuan Teknis Bank Indonesia	13
2. Teori UMKM.....	21
3. Teori Implementasi.....	24
4. Bank Indonesia	27

C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	38
C. Objek dan Subjek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Pengabsahan Data	44
F. Analisi Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum	48
1. Sejarah dan Profil Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.....	48
2. Profil Unit Pelaksana	51
B. Penyajian Data	53
1. Apa Saja Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?	54
2. Bagaimana Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?.....	62
C. Analisis Data	77
1. Bentuk Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya	78
2. Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya	90
BAB V KESIMPULAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Tugas Pokok dan Produk Unit Kerja Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi (TAPE) Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU)	51



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	37
--------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Pilar Utama 30



DAFTAR SINGKATAN

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

UMKM :Usaha Mikro Kecil Menengah

BI :Bank Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

BANTEK :Bantuan Teknis

KPw BI :Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Kal-Teng : Kalimantan Tengah

UU : Undang-Undang

CSR : Corporate Sosial Responsibility

GWM : Giro Wajib Minimum

TPID : Tim Pengendali Inflasi Daerah

BA B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun perekonomian di Indonesia merupakan tugas bersama baik dari kebijakan pemerintah, keikutsertaan lembaga-lembaga disektor keuangan dan para pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan mampu memanfaatkan kebijakan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Proses pemulihan kegiatan ekonomi, dilakukan beberapa upaya perbaikan dan pengembangan diberbagai sektor strategis. Adapun dasar yang menjadi perhatian penting bagi bank sentral berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 06 tahun 2009, salah satu tugas utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi. Untuk itu Bank Indonesia melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor utama penyumbang inflasi daerah. Salah satu faktor penyebab inflasi bersumber dari fluktuasi harga terutama dipicu oleh kendala produksi, lemahnya kelembagaan petani, inefisiensi struktur pasar, ketidak lancaran distribusi kurangnya dukungan infrastruktur maupun kebijakan pemerintah.¹

¹Laporan Kajian Arah Pengembangan Kluster Nasional Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi, Bank Indonesia 2017, h.1.

Pada triwulan III 2019 provinsi Kalimantan Tengah, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (9,53%). kategori selanjutnya adalah kategori jasa pendidikan (9,07%), jasa keuangan dan asuransi (8,80%) dan jasa konstruksi (8,50%).² Melihat kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya yang semakin berkembang upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing pelaku usaha yang ditempuh dengan berbagai macam cara.

Penyelenggaraan pertemuan yang mempertemukan penyedia jasa keuangan perbankan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengendalian inflasi, dan bimbingan teknis. Dari cara tersebut merupakan salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia mendorong pengembangan pelaku usaha melalui pemberian bantuan teknis. Didalamnya juga terdapat kegiatan pelatihan dan penyediaan informasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha tentunya juga *stakeholder* dan pihak pihak yang berkepentingan dalam pemberdayaan. Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi.

Menjadi perhatian juga bagi KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan penyaluran keuangan perbankan kepada pelaku usaha melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas

²Laporan Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, Edisi Desember 2019. Kalimantan Tengah: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2019, h.12.

Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana.³

Berdasarkan hasil observasi awal di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah peneliti menemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji: pertama, KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program khusus untuk membantu dalam mengembangkan UMKM berupa penyaluran bantuan teknis. Kedua, peneliti menemukan dalam meningkatkan modal usaha UMKM Bank Indonesia membuat kebijakan tentang kewajiban perbankan umum dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Ketiga, Bank Indonesia sangat terbuka kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian dalam menjaga inflasi. Namun banyak dari masyarakat atau pelaku usaha tidak mengerti kriteria yang menjadi syarat mendapatkan bantuan teknis dan mekanismenya.⁴

Kondisi Bank Indonesia yang sudah terbatas dalam memberikan dukungan, masih dapat membantu dalam segi kebijakan Bank Indonesia dari sisi *supply* maupun *demand* lebih difokuskan dalam rangka mendorong intermediasi perbankan serta mendukung sistem perbankan yang sehat. Dari sisi *supply* Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa perbankan wajib mpemberikan kredit kepada UMKM dalam meningkatkan perekonomian sera Bank Indonesia akan menerima laporan dari hasil pembiayaan tersebut.

³Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kecana 2016, h.82

⁴Hasil Observasi awal 03 Juni 2019

Kebijakan Bank Indonesia pada pemberian bantuan teknis dalam undang-undang mengembangkan ekonomi disektor usaha mengalami perubahan yang mendasar karena Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) tugas tersebut sudah bergeser kepada perbankan. Pendekatan pemberian subsidi bunga murah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitik beratkan pada pelatihan, dan penyediaan informasi. Sehingga perlunya dikaji dan pemberian informasi bantuan apa saja yang bisa di berikan oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait **"Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kepada UMKM di Kota Palangka Raya"**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas rumusan masalah yang peneliti buat sebagai berikut:

1. Apa saja bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana implementasi bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepad UMKM di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberian bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui Implementasi bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai implementasi bantuan teknis, tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam mengembangkan perekonomian daerah.
 - b. Diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi dunia ekonomi.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan mampu memberi bahan informasi tambahan untuk melengkapi dan memperbaiki penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kpw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam strategi mengembangkan UMKM sebagai role model sehingga dapat di jadikan contoh untuk pengusaha lainnya dan pemerintah dalam memajukan perekonomian di Kalimantan Tengah.
- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 bab, yang masing-masing adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Konsep Penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori yang terdiri dari teori implementasi, teori UMKM, teori bantuan teknis, konsep Bank Indonesia dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknis analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan implementasi bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

Bab V yaitu bagian penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Peneliti mencoba menghubungkan variabel-variabel yang sudah ada pada peneliti terdahulu. Penemuan fenomena bantuan teknis dari Bank Indonesia dan teori pada penelitian terdahulu juga menjadi bahan acuan pada kajian pustaka pada penelitian ini.

Helwiyani Maulida, (2014) meneliti tentang “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah” pentingnya keberadaan UMKM untuk menstabilkan kondisi moneter regional Kalimantan Tengah, juga alat untuk membangun perekonomian tingkat regional yang dilakukan KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan UMKM selaku penanggungjawab masalah moneter provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan UMKM melalui penelitian.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan UMKM berperan penting dapat memberikan bantuan teknis dalam rangka mendukung pengembangan UMKM bantuan teknis yang dimaksud meliputi: penelitian,

⁵Helwiyani Maulida. *Peran Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2014, h. 1-3.

pelatihan, penyediaan informasi, fasilitasi. Persamaannya yaitu subjek KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Manfaat yang dapat peneliti ambil dari peneliti sebelumnya adalah menambah pemahaman dan kajian teori dari hasil bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM dan peningkatan modal usaha bagi UMKM melalui perbankan.

Amalia Ananda, (2018) meneliti tentang “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatra Utara”. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui sisi permintaan dan penawaran. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM. Kebijakan penyaluran dana perbankan kepada UMKM tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan makroprudensial mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan *Loan To Funding Ratio*, dan pemberian insentif bagi bank umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM di Medan Sumatra Utara.⁶ Hasil penelitian ini mengenai peran BI dalam mengembangkan UMKM di

⁶Amalia Ananda. *Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatra Utara*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2018, h. 1-3.

Kota Medan Sumatra Utara pada umumnya dapat meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mendukung dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemerataan dalam pembangunan. Adapun manfaat bagi peneliti berupa tambahan literasi tentang Bank Indonesia dan sikap peneliti akan mengkaji lebih dalam implementasi peraturan KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kewajiban perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

Aliyah Khairunnisa, (2018) meneliti tentang “Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kantor Perwakilan Bank Indonesia”. Keberpihakan kepada UMKM yang masih setengah-setengah kemudian menyebabkan peran UMKM dalam perekonomian masih kalah jauh dengan sektor usaha formal atau usaha besar. Program sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah merupakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia. Program Ini diharapkan nantinya akan membantu peningkatan kapasitas ekonomi nasional serta mendukung tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tercermin dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, perkembangan UMKM di Kota Palangka Raya umumnya masih mengalami berbagai masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembang UMKM diantaranya permasalahan modal rendahnya kualitas sumberdaya manusia, masalah pemasaran, masalah perizinan, terbatasnya

sarana prasarana serta rendahnya minat beli masyarakat. Kedua Bank Sentral tentunya memiliki peran penting dalam membantu perkembangan UMKM di Kota Palangka Raya lewat Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), pengembangan UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: a) Permodalan b) Edukasi atau *training* c) *Controlling* atau pengawasan, d) *Packaging* atau kemasan, e) *Marketing*. Hasil yang didapat setelah adanya pemberdayaan UMKM tersebut mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan produksi serta keterampilan *skill*.⁷

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objeknya penelitian terdahulu berfokus pada revitalisasi UMKM, Sedangkan peneliti tentang implementasi bantuan teknis. Kemudian persamaanya terdapat dalam subjek penelitian yaitu KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan UMKM yang menerima bantuan. Adapun manfaat yang dapat peneliti ambil dari penelitian sebelumnya adalah tambahan informasi dari hasil penelitian berupa bentuk-bentuk bantuan yang di berikan KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM yang nantinya akan menjadi tolak ukur peneliti saat melakukan penelitian agar dapat lebih mengembangkan inovasi dan pembaharuan informasi.

⁷Aliyah Khairunnisa. *Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosila bank Indonesia (PSBI) kantor Perwakilan Bank Indonesia*, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2018, h. 1-3

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penelitian(Tahun) /Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Helwiyani Maulida, (2014) meneliti tentang “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah”	Persamaan terdapat pada subjek penelitian yakni KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, metode penelitiannya sama menggunakan deskriptif kualitatif.	Perbedaannya adalah objek penelitian peneliti sebelumnya berupa peran KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. mengembangkan UMKM, sedangkan peneliti implementasi bantuan teknis.
2	Amalia Ananda, (2018) meneliti tentang “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatra Utara”.	Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang objek Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Bank Indonesia membantu intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaannya adalah subjek penelitian sebelumnya berada di daerah Medan sedangkan peneliti berada di daerah Kalimantan Tengah, lebih mengangkat perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan
3	Aliyah Khairunnisa, (2018) meneliti tentang “ Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosila bank Indonesia (PSBI) kantor Perwakilan Bank Indonesia”	Persamaan penelitian ini subjeknya KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan perekonomian, sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaannya adalah bantuan yang diteliti pada peneliti terdahulu berupa PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) sedang peneliti meneliti tentang Bantuan Teknis. Perbedaan yang terletak pada studi kasus peneliti mencoba melihat peningkatan pemberian bantuan dalam pembiayaan perbankan syariah.

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti,2020

B. Kajian Teori

1. Bantuan Teknis

Pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia sejak diberlakukan UU No.23 tahun 1999, disempurnakan menjadi satu naungan, yakni bantuan teknis pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM) dengan fokus kegiatan pada pelatihan, penelitian dan sosialisasi tetapi diberikan secara terbatas. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada. UMKM dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain kegiatan bantuan teknis meliputi pelatihan dan atau penyediaan informasi. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran Bank Indonesia dalam membantu UMKM dari *development role* menjadi *promotional role*.⁸ Bantuan teknis bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/ atau pengendalian inflasi dengan kegiatan.

Melihat pengertian diatas bantuan teknis juga bisa disebut tanggung jawab sosial yang diberikan secara terbatas kepada pelaku UMKM yang dalam Islam bukanlah merupakan suatu yang asing, karena hal ini sudah diperaktekan sejak abad 14 yang lalu. Dalam Al-Qur'an pembahasa tanggung jawab sosial sering disebutkan. Al-Qur'an selalu mengaitkan antara kejayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat di

⁸Abdul Aziz, *Peranan Bank Indonesia Di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebank Sentralan PPSK BI 2009, h.75.

pengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis yang terdapat dalam surat *Al-Israa* 17;35:⁹

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٠﴾

Artinya :dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam melaksanakan bantuan harus dilaksanakan adil, bijaksana dan jujur. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Hal ini berarti aktifitas ekonomi islam adalah aktifitas kolektif bukan individu.¹¹ Bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM merupakan unsur tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

⁹Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktek*, Jakarta: kencana 2017, h.11.

¹⁰Shabbani Shodaq E. Kusman, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5(lima)*, Bandung:Cordoba, 2020, h. 106

¹¹Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada 2007, h.7

¹²Shabbani Shodaq E. Kusman, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5(lima)*,....., h. 285

a. Penelitian

Menurut Grinnel dalam bukunya penelitian berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari dua kata *re* yang berarti lagi atau kembali dan *search* yang berarti mencari atau menguji secara cermat dan hati-hati untuk mencoba atau membuktikan. Secara bersama-sama dua kata tersebut (*research*) berarti suatu studi atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, sabar dalam satu bidang pengetahuan, yang dilakukan untuk menemukan fakta atau prinsip.

Menurut Burns dalam bukunya penelitian adalah investigasi atau penyelidikan secara sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. menurut Kerlinger penelitian ilmiah adalah investigasi atau penyelidikan secara sistematis, empiris terkontrol dan kritis terhadap proposisi tentang hubungan dari berbagai fenomena.

Penelitian menunjukkan adanya proses bentuk siklus bersusun yang selalu berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keingin tahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. Selanjutnya direncanakan dan dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan tersebut akan timbul

permasalahan baru, sehingga akan terjadi siklus secara berkesinambungan.¹³

b. Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan berbagai pembelajaran dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis kererampilan tertentu. Pelatihan ialah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu.

Tujuan pelatihan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kinerja, dan perilaku individu, kelompok maupun organisasi. Oleh karena itu kegiatan pelatihan harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Dari segi materi pelatihan dibagi menjadi dua yaitu: ¹⁴

1) Pelatihan Wacana (*Knowledge Based Training*)

Adalah sebuah pelatihan mengenai sebuah wacana baru yang harus disosialisasikan kepada peserta pelatihan dengan tujuan wacana

¹³Restu Kartika Widi, *Enggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish Publisher 2018, h. 41-42

¹⁴Budi Santoso, *Skema dan Mekanisme Pelatihan Panduan Pelatihan*, Jakarta: Yayasan Terumbu Karang, h.1-4

baru tersebut dapat meningkatkan pencapaian tujuan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga.

2) Pelatihan Keterampilan (*Skill Based Training*)

Adalah sebuah pelatihan mengenai pengenalan atau pendalaman keterampilan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga baik secara teknis (*hard skill*) maupun bersifat non teknis yang lebih bersifat pada pengembangan pribadi (*soft skill*). *Hard skill* bersifat sangat teknis maka cukup mudah dipelajari berdasarkan panduan, dan mudah diukur hasil pelaksanaannya. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedang *soft skill* lebih sulit dalam pengukurannya dengan kualitatif.¹⁵

c. Penyediaan Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si-penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Fungsi informasi yaitu menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna

¹⁵*Ibid.*

memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan suatu keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga memberikan standar aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan.¹⁶

d. Fasilitasi

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) dari beberapa asosiasi usaha, terdengar diataranya pengusaha besar karena banyak memanfaatkan fasilitas. Kebetulan faktor yang membantu kesuksesannya adalah banyaknya dukungan fasilitas yang diperolehnya. Baiknya fasilitas permodalan, akses pemasaran, beragam pelatihan manajemen maupun fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁷

Selain itu, penguatan terhadap usaha kecil dan menengah merupakan pilihan yang cukup solutif terhadap berbagai persoalan kemiskinan dan pengangguran sehingga diharapkan penyediaan fasilitas bagi mereka melalui berbagai kebijakan pemerintah bukan hanya akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian nasional namun juga membantu menyelesaikan atau mengurangi *problem* sosial.

Pada saat ini, sudah banyak fasilitas yang sudah disediakan oleh berbagai pihak guna mendukung majunya usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk penyediaan fasilitas pelatihan, pembentukan manajemen yang andal, peralatan produksi, sampai pemasaran produk.

¹⁶ Jeperson Hutahean, *Konsep Sitem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h.2.

¹⁷ Yusuf CK Arianto, *Rahasia dapat modal dan fasilitas dengan Cepat dan Tepat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2011, h.20.

Seperti yang dikatakan oleh F. Drucker, proses kewirausahaan melibatkan kompleksitas potensi individual dan dukungan lingkungan secara timbal balik. Artinya masyarakat cerdas pada gilirannya akan mampu menghasilkan kewirausahaan cerdas. Mereka bukan hanya mengandalkan semangat kerja keras, namun juga pola kerja cerdas, terutama untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan global yang semakin kompetitif.¹⁸

Sementara itu untuk menyikapi kondisi perekonomian dan intermediasi perbankan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2004-2006, maka pada tahun 2007 Bank Indonesia telah menetapkan salah satu kebijakan prioritas untuk mendorong percepatan sektor riil dan UMKM diberbagai daerah melalui peningkatan intermediasi perbankan.¹⁹

e. Kewajiban Pembiayaan Perbankan Syariah

Pemberian kredit atau pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan 2014 yang sesuai dengan kemampuan Bank Umum pada tahun 2015 yang ditetapkan paling besar 5%, tahun 2016 paling rendah sebesar 10% tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.

¹⁸Supriadi Amir, *Cara Gampang Mendapatkan Modal Dan Fasilitas*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas 2014, h.140.

¹⁹Ibid, h. 77.

Penerapan didalamnya masih banyak kendala untuk penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM.²⁰ Kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan kepada UMKM tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan makroprudensial mengenai giro wajib minimum berdasarkan *loan to funding ratio*, dan pemberian insentif bagi bank umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM.

Bank Umum juga wajib melakukan pelaporan dalam pembiayaan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia 17/12/PBI/2015 Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Pasal 5A dan pasal 5B yang berbunyi:

- 1) Bank Umum Wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Bank Indonesia secara *online* melalui Laporan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum dan laporan stabilitas moneter dan system keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

²⁰Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

- 2) Dalam hal penyampaian laporan secara *online* untuk laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola *executing* belum tersedia, Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing*.

2. Teori UMKM

Adanya definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara jelas diperlukan untuk tujuan perencanaan dan penetapan kebijakan pengembangan sektor usaha tersebut. Selain itu definisi dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM dan efektivitas program pembinaan kepada unit usaha yang dimaksud. Namun salah satu kesulitan adalah tidak adanya pengertian yang berlaku secara universal tentang kriteria dari UMKM meski ada perbedaan diberbagai negara, namun secara umum ada beberapa indikator dan kriteria yang lazim digunakan dalam definisi.²¹

Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, menggolongkan menjadi empat berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama adalah industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Kedua adalah industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 9 orang. Ketiga adalah industri sedang menengah apa bila memiliki

²¹ Abdul Azis dan A. Herani Ruslan, Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan 2009, h. 3.

tenaga kerja antara 10 sampai 99 orang. Terakhir adalah industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.²²

Di negara kita pengertian usaha Mikro Kecil dan Menengah di jelaskan di Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu dilihat dari jumlah karyawan atau tenaga kerja yang dimiliki. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro yaitu:²³

- a) Usaha yang memiliki jumlah karyawan maksimum 4 orang. Usaha kecil yaitu Usaha yang jumlah karyawannya antara 4 sampai 19 orang. Usaha menengah jumlah karyawannya minimal 20 orang dan maksimal 100 orang.
- b) Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran besar dan tidak menjadi beban pemerintah.
- c) Pada saat sekarang ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran.
- d) UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto.

Berdasarkan jumlah aset dan omzet penjualannya kriteria UMKM sebagai berikut:²⁴

²²Rachmawan Budiarto,dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2015, h.2.

²³ Ibid. h.6

²⁴ Darmanto, FX. Sri Wardaya, Lilis Sulistiyani, *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Model Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish 2018, h.2

- a) Kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
- b) Kriteria usaha kecil adalah sebagai memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.
- c) Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh miliar rupiah.²⁵

Melihat definisi diatas Bank Indonesia juga memiliki pengertian karakteristik tersendiri yang merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha dengan usahanya menurut Bank Dunia, UMKM dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 1). Usaha Mikro jumlah karyawan 10 orang; 2).Usaha Kecil jumlah karyawan 30 orang; dan 3). Usaha Menengah jumlah karyawan 300 orang.²⁶

²⁵ Ibid, h.3.

²⁶ Profil bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM kerja sama LPII dengan Bank Indonesia 2015 h. 12

Dalam perspektif usaha UMKM di klasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a) UMKM sektor informal contoh pedagang kaki lima
- b) UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengerajin namun kurang dalam memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerja sama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki kewirausahaan yang cakap dan siap bertransformasi menjadi usaha besar.²⁷

3. Teori Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diuangkan dalam tujuan tersebut.²⁸

Model Grindel mengemukakan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama yaitu, *content of policy and content of implementation* (isi kebijakan dan konteks implementasinya, dan *impact*).

²⁷ *Ibid*, h.12.

²⁸ Puji Melita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia 2012, h.6.

Ide dasarnya adalah setiap kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan harus dilakukan dan dampaknya harus diperhatikan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan dan kedudukan pembuat kebijakan
- d. Pelaksanaan program
- e. Sumberdaya yang dikerahkan

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi artinya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dikeluarkan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika *polycy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁹

Dua ahli yang bernama Hogwood dan Lewis A.Gunn oleh para ahli ilmu politik dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan *theto-down approach*. Menurut kedua ahli tersebut untuk dapat mengimplementasi suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka dibutuhkan banyak syarat. Syarat-syarat tersebut adalah:

²⁹Dr. Ismet Sulilah, SE., M.Si, *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish 2015, h. 61.

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan ketergantungan harus kecil
- g. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna³⁰

Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teoriya dengan mengajukan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal?. Pertanyaan itu dijawab sendiri dengan menyampaikan enam variabel yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja

³⁰ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2014, h.108

kebijaka. Keenam variabel tersebut meliputi: standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karekteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.³¹

4. Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan diubah dengan Undang-Undang No. 6/2009. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang yang berlaku disuatu negara. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Undang-Undang memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melasanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.³²

Bank Indonesia atau BI dulunya adalah *De Javasche Bank*. Setelah bangsa Belanda datang ke Nusantara dan mendirikan perusahaan dengan VOC, Belanda mulai mendirikan bank untuk memudahkan kegiatan perdagangan. Bank pertama yang didirikan adalah *De Bank Van Leening* tahun 1746. Selanjutnya Belanda

³¹*Ibid*, h.109

³²Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish 2019, h.3.

berencana membuat bank untuk mengatur peredaran uang. Bank yang berfungsi untuk mengatur peredaran uang disebut bank sentral. Kemudian gerakan nasional untuk lebih menyesuaikan dengan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga segala bentuk nama harus lebih meng-Indonesia. Maka pada 1 Juli 1953 nama *De Javasche Bank* diganti menjadi Bank Indonesia.³³

b. Status dan Wewenang Bank Indonesia

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar.³⁴

c. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah ini memerlukan dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang asing. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar

³³ Nilla Endah S.H. *Mengenal Sejarah Bank Di Indonesia*, h.49

³⁴ *Ibid*, h. 3.

rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.³⁵

Sesuai dengan undang-undang tentang Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir 2013 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitan itu Bank Indonesia diberi mandat baru berupa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Makroprudensial ini diamanatkan dalam undang-undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut dilaksanakan melalui sinergi bauran kebijakan moneter dan sistem pembayaran.³⁶

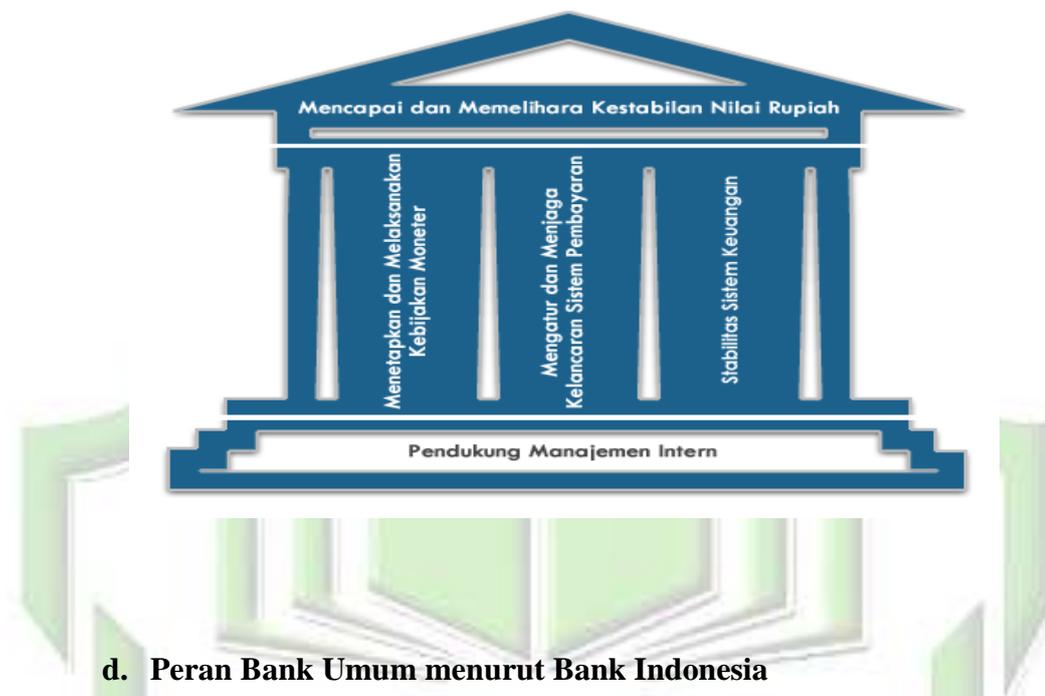
Agar mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut

³⁵Prof. Dr. Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, S.Pd., M.M., Menik Kurnia Siwi, S.Pd., M.Pd, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana 2016, h. 38

³⁶Laporan Tahunan Bank Indonesia Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan 2018, h.

tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.³⁷

Gambar 1. Tiga Pilar Utama



d. Peran Bank Umum menurut Bank Indonesia

Bank umum adalah bank yang fungsinya bukan sebagai bank sentral namun hanya melayani kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembayaran.³⁸ Pengertian bank umum menurut peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran jasa yang diberikan bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh

³⁷Tugas dan Tujuan Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses pada 14 Februari 2020, pukul 17:14.

³⁸Nilla Endah S.H. *Mengenal Sejarah Bank Di Indonesia*. Kartasuro, Sukaharjo: CV Graha Printama Selaras 2016, h.52.

jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).³⁹ Beberapa peranan bank umum sebagai berikut:

- 1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai atau kredit.
- 2) Penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
- 3) Mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.

³⁹*Ibid*, h.45

- 4) Menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa.
- 5) Pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank sehingga dirasakan amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakan.⁴⁰

a) Bank Umum Syariah

Bank syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram. Bank syariah diberi amanat oleh UU Perbankan Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,

⁴⁰ *Ibid*, h.45-46

atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).⁴¹

b) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang beroperasi berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan umum yang berkembang seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Prinsip operasi bank konvensional yaitu penerapan metode bunga. Bunga adalah harga yang ditetapkan oleh bank untuk memasarkan produk dan layanannya kepada masyarakat. Ketika masyarakat menanamkan uangnya ke bank maka akan timbul bunga simpanan yang harus dibayarkan bank ke nasabah. Untuk memperoleh keuntungan, bunga pinjaman ditetapkan bank pada nasabah yang mengambil pinjaman dana.⁴²

e. **Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah pertama, meningkatkan dan memelihara

⁴¹ Hadi Ismanto dkk, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher 2019, h.8.

⁴²Ibid, h.8.

kepercayaan publik dibidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan yang seperti terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalau tidak terulang lagi.⁴³

Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.⁴⁴

Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* merupakan tugas dan wewenang

⁴³Marfuatun Uliya. *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Relasi Inti Media 2017, h.3

⁴⁴*Ibid*, h.3-4.

OJK. Adapun lingkup pengaturan dan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.⁴⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi bantuan teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tugas Bank Indonesia melalui kebijakan pemberian bantuan teknis dalam meningkatkan perekonomian serta menjaga stabilitas inflasi.

Semakin berkembangnya perekonomian di Kalimantan Tengah harus diiringi dengan peningkatan kualitas baik itu dari segi kualitas sumber daya manusia, produksi dan kemampuan dalam mendapatkan kemudahan dalam akses keuangan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia. Untuk itu peneliti ingin mengkaji implementasi dalam pemberian bantuan teknis. Setelah kebijakan Bank Indonesia berubah menjadi tidak dapat lagi memberikan subsidi atau bantuan bunga murah yaitu Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bergeser kepada pendekatan yang lebih menitik beratkan pada pelatihan, dan penyediaan informasi bantuan Bank Indonesia serta lebih melibatkan intermediasi perbankan. Melalui peraturan Bank Indonesia

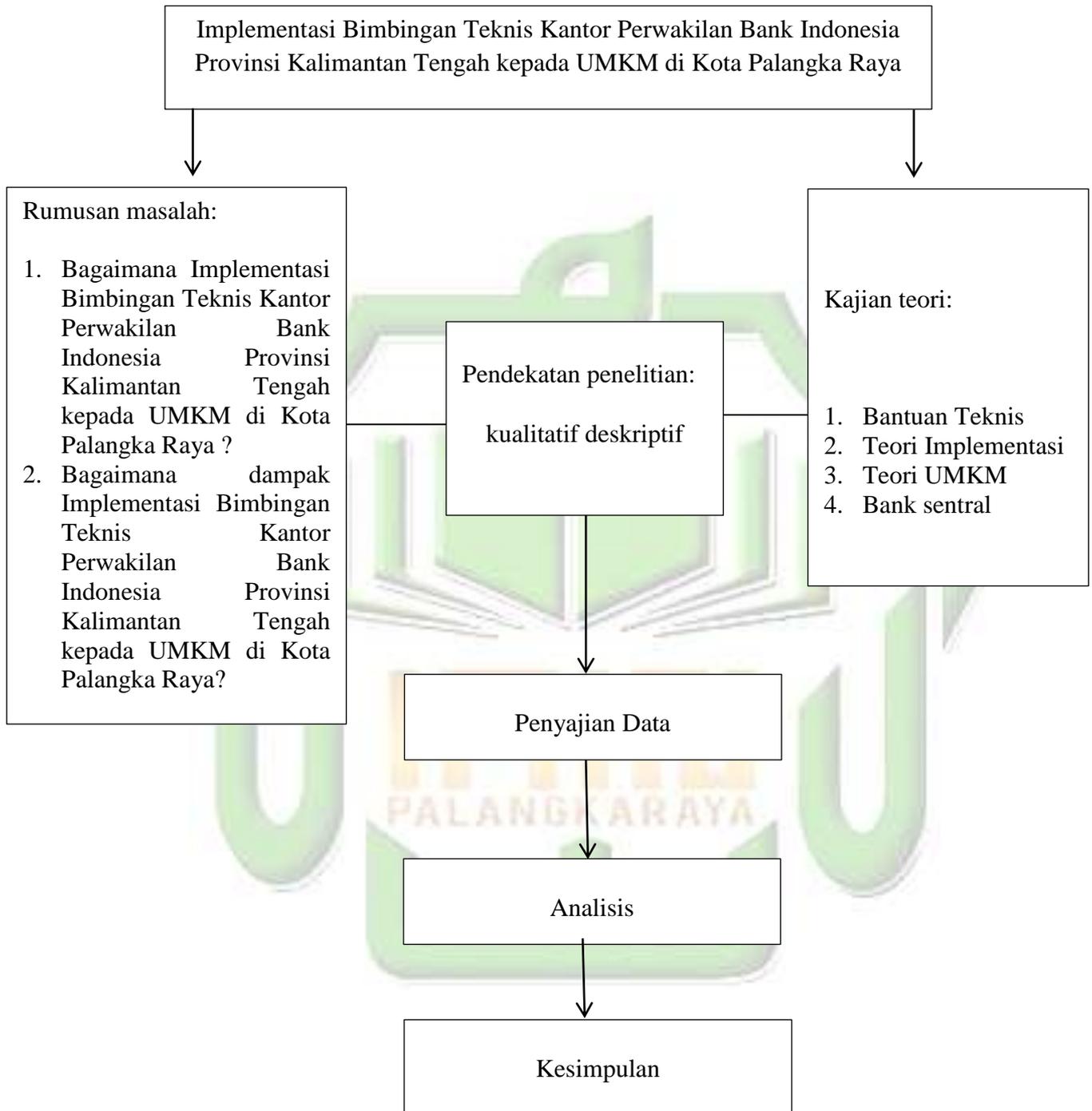
⁴⁵ Booklet Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Edisi 1 2014 issn 1858-4233 h.19

perbankan wajib memberikan pembiayaan kepada UMKM yang juga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha.



Bagan 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah selama tiga bulan terhitung dari bulan Juni sampai Oktober tahun 2020 dan setelah naskah proposal disetujui kemudian mendapat surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah JL. Diponegoro No.17 Palangka Raya.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden.⁴⁶ Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu, pengumpulan data secara alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah kunci utama.⁴⁷

⁴⁶Dr. Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press 2012, h.3.

⁴⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, S. Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak 2018, h.8.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berada pada saat ini atau lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁴⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.⁴⁹ Sehingga data yang didapat murni dan tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu inti dari problematika penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi bantuan teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian.⁵⁰ Untuk memilih subjek, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan

⁴⁸Muh. Fitrah, M.Pd., dan Dr. Luthfiah, M.Ag, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak 2017, h.36.

⁴⁹Dr. Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press 2012, h.3

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi* Jakarta: Renika Cipta 2005, h. 116.

sampel sumberdata dari pertimbangan tertentu.⁵¹ Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memilih responden yang sulit tercapai, oleh karena itu peneliti cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti. Adapun pertimbangan yang dimuat dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersedia diwawancara.
- 2) Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah
- 3) Pelaksana Bantuan Teknis
- 4) Berada di Kota Palangka Raya

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih 3 subjek utama untuk dijadikan sumber informasi dalam penelitian lapangan. Sedangkan untuk informan peneliti memilih 2 tambahan informan yang disarankan oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dari UMKM penerima bantuan teknis dan 2 perbankan syariah yang menjalankan bantuan dalam melaksanakan pembiayaan di Kota Palangka Raya.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Bandung: Alfabeta tahun 2010 h.219.

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

NO	Kategori Subjek	Kode
1	Staf Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM (FPPU)	AB
2	Staf Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM (FPPU)	AD
3	Staf Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK)	IO
4	Pelaku UMKM yang mendapat bantuan teknis Kota Palangka Raya	AW, ST
5	BNI Syariah Kota Palangka Raya	DN
6	BRI Syariah Kota Palangka Raya	AS

Sumber : Data Wawancara, 2020

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan dengan menggunakan teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁵² Untuk memperoleh data yang relevan mengenai masalah-masalah ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Kominaksi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana 2018, h.76.

1. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan.⁵³

Melalui tahap observasi ini peneliti mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Teknik pengamatan ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang implementasi bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya. Data yang diperoleh dari melalui pengamatan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Metode pengamatan ini berupa pengamatan langsung dan didukung dengan wawancara untuk mendapatkan data tentang implementasi bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya. Kemudian dianalisis dan didefinisikan kegiatan apa saja yang dikembangkan oleh pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan

⁵³Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2004, h.39.

itu.⁵⁴ Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁵⁵ Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan penggalian data dalam penelitian.⁵⁶

Dalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam harus menentukan informan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai atau pihak terkait yang menjadi penanggung jawab program dalam pelaksanaan pengembangan bantuan teknis di KPw Bank Indonesia dan perbankan syariah Cabang Kota Palangka Raya yang melakukan pembiayaan kepada UMKM, serta UMKM yang mendapat bantuan teknis dari KPw Bank Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁵⁷ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari

⁵⁴Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2008, h.127.

⁵⁵Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 39.

⁵⁶Imam Suprayogo, dan Toroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2003, h. 173.

⁵⁷Basroei dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rineka Cipta, 2008, h.135.

penggunaan metode observasi dan interview dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode dokumentasi ini untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.⁵⁸

Melalui tahap dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumen data UMKM yang mendapat bantuan dari tahun 2016 sampai 2018, gambar dokumentasi pelatihan, gambar selama proses pengumpulan data dan sejumlah dokumen-dokumen terkait bantuan teknis KPw Bank Indonesai Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah data yang masih mentah yang artinya masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah data diperoleh, hal selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menguji keabsahan data yang didapatkan.⁵⁹ Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan menggunakan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.

Dengan mengacu pada Denzin, menurutnya pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini ada 4 macam triangulasi yaitu, peneliti, sumber, metode, dan teori.⁶⁰ Adapun teknik pengabsahan data pada penelitian

⁵⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. h. 87.

⁵⁹Albi Anggito dan Jhohan Setiawan S.Pd, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak 2018, h. 214.

⁶⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2007, h.264.

ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Analisi Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹

⁶¹*Ibid*, h. 183.

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data) Menurut Miles dan Huber Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
3. *Penyajian Data*, Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.
4. *Kesimpulan dan Verifikasi*, Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi utuh. Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang analisis kualitatif mulai mencari benda-benda,

mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab- akibat dan proposisi.⁶²



⁶²Albi Anggito dan Jhohan Setiawan S.Pd, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak 2018, h. 243-249

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Profil Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia

Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Bank Indonesia (KBI) Palangka Raya diresmikan pembukaannya pada tanggal 11 Agustus 1992 oleh Gubernur Bank Indonesia Bp. Adrianus Mooy. Pembukaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/57/KEP/DIR tanggal 8 Agustus 1992. Lokasi gedung KBI Palangka Raya terletak di Jl. Diponegoro No.17, dan berada di atas tanah seluas 16.975 m² dengan luas bangunan 2.259 m². Gedung KBI Palangka Raya ini merupakan eks. Gedung Kantor Walikota madya Palangka Raya yang telah dilakukan perbaikan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa tugas diantara lain yaitu, menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Tengah, menjaga kelancaran sistem pembayaran, menstabilisasi sistem keuangan, berkordinasi dengan pemerintah, dinas-dinas, institusi-institusi dan perusahaan untuk menjaga hubungan baik agar saling berjalan bersama demi Kalteng yang lebih baik.⁶³

⁶³ Visi misi Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/> diakses (online 5 juni 2020)

a. Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara Negara *emerging markets*.

b. Misi

- 1) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- 2) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- 4) Turut Mendukung stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesiadengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- 5) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- 6) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

- 7) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.⁶⁵

c. Nilai-Nilai Strategis

- 1) *Trust and Integrity* (Kejujuran dan Integritas)
- 2) *Professionalism* (Profesionalisme)
- 3) *Excellence* (Keunggulan)
- 4) *Public Interest* (Mengutamakan Kepentingan Umum)
- 5) *Coordination and Teamwork* (koordinasi dan kerja sama tim)
- 6) *Religius* (Berlandaskan nilai-nilai agama)

d. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- 1) Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran;
- 2) Menjaga stabilitas nilai tukar;
- 3) Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien;
- 4) Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan *surveillance* SP;
- 5) Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis;
- 6) Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar;
- 7) Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel;

⁶⁵ *Ibid.*

- 8) Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan *governance*;
- 9) Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten;
- 10) Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI.⁶⁶

2. Profil Unit Pelaksana

Pelaksana dalam pengembangan ekonomi lokal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah terdapat pada unit FPPU (Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM) mereka membina dan memberdayakan UMKM demi membantu BI dalam mencapai tujuannya, biasanya para petani dan peternak yang memiliki potensi besar dibina dan diberikan bantuan berupa alat dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan produksinya. Dan biasanya BI juga melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengelola tempat tersebut.

Selain itu tugas FPPU yang lain yaitu membina UMKM yang bergerak dibidang industri kerajinan khas Kalimantan Tengah seperti kerajinan dari bahan rotan, bambu, kulit kayu dan lain sebagainya. Tujuan semua hal tersebut yaitu demi memajukan perekonomian Kalimantan Tengah dan memakmurkan serta mensejahterakan masyarakatnya. Peneliti juga mendapatkan data tugas pokok dan produk unit kerja sebagai berikut.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hasi Data dokumentasi Awal di KPw Bank Indonesia tanggal 27 Desember 2019.

Tabel 4.1
Tugas Pokok Dan Produk Unit Kerja
Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi (TAPE) Fungsi
Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU)

No.	Tugas Pokok	Produk Pokok
1.	Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.	a. Kajian dan rekomendasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM; b. Terlaksananya kegiatan bantuan teknis (penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan/atau fasilitasi); c. Implementasi Program pengembangan UMKM (Pengembangan Komoditi strategis, program pengembangan ekonomi berbasis komunitas, <i>Local Economic Development (LED)</i> , <i>Value Chain Financing</i> , perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD), <i>credit rating</i> , fasilitasi).
2.	Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM (melalui dukungan pengutan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan	Terlaksananya fasilitasi upaya peningkatan akses UMKM kepada perbankan (melalui penyusunan <i>lending model</i> , <i>value chain financing</i> , perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD),

	penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	<i>credit rating</i>).
3.	Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.	Penyediaan informasi terkait UMKM (data profil UMKM, data hasil kajian Komoditas Produk Jenis Usaha (KPJU) unggulan UMKM dan lending model).
4.	Melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders setempat dalam rangka pengembangan UMKM.	Laporan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders (Pemerintah Daerah, perbankan dan internal Bank Indonesia).

Sumber: Data KPw Bank Provinsi Kalimantan Tengah

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh melalui wawancara dari narasumber masih ada yang menggunakan Bahasa Indonesia tidak sempurna dalam artian narasumber masih mencampurkan dengan bahasa daerah mereka. Oleh karena itu, peneliti menambahkan kembali penyajian data wawancara dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik untuk memudahkan dalam membaca dan memahami penyajian data penelitian tanpa menghilangkan redaksi asli dari hasil wawancara tersebut.

1. Apa Saja Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?

Subjek 1

Nama : AB

Jenis kelamin :Laki-laki

Jabatan :Pegawai Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU)

Hasil wawancara dengan subjek AB yang merupakan pegawai KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan program bantuan teknis yaitu staf pegawai Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) peneliti menanyakan apa saja bentuk bantuan teknis kemudian dijelaskan:

Penelitian, pelatihan, pemberian informasi, pembinaan/ bimbingan, fasilitasi sebenarnya semua itu saling berkaitan, misalnya kita nih mau variabel baru dari cabe, dari situ kita melakukan penelitian terkait itu kita monitoring juga, terakhir kita melakukan penelitian terkait potensi UMKM di Kalimantan Tengah.⁶⁸

Penjelasan dari bapak AB bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, bimbingan/pendampingan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Bantuan tersebut dijelaskan satu kesatuan yang saling berkaitan, seperti bantuan pelatihan UMKM juga mendapatkan pemberian informasi. Contoh pemberian penelitian ialah dalam mengembangkan variabel klaster petani cabe maka diperlukan penelitian untuk mendapatkan cabe yang unggul,

⁶⁸ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

kemudian akan ditindak lanjuti dan dilakukan monitoring. Penelitian dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri yaitu oleh unit Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) terakhir meneliti tentang potensi UMKM di Kalimantan Tengah. Dari hasil penelitian tersebut Bank Indonesia menemukan banyaknya potensi dari setiap daerah yang berbeda-beda di Kalimantan Tengah yang bisa dikembangkan.

Selanjutnya subjek AB menjelaskan proses dalam memberikan bantuan pelatihan yang diinginkan oleh UMKM sebagai berikut :

Pemberian pelatihan kepada UMKM misalnya keterampilan tergantung juga UMKM maunya apa, misalnya petani cabe dalam penanganan hama, misalkan UMKM tentang jualan *online* sesuai kebutuhan UMKM, kita tanyain dulu. Tapi ya kami lebih mengutamakan pada klaster UMKM dan binaan terlebih dahulu.⁶⁹

Informasi tambahan tersebut menjelaskan pemberian bantuan pelatihan keterampilan menyesuaikan kebutuhan masing-masing dalam mengembangkan kualitas UMKM kemudian mengajukan pelatihan yang diinginkan kepada Bank Indonesia. Petani cabe yang menginginkan pelatihan tentang cara menangani hama dan UMKM yang ingin belajar membuat *marketplace* untuk mengembangkan usaha mereka. Kembali pihak Bank Indonesia lebih mengutamakan klaster UMKM ketahanan pangan yang dimaksud dan binaan.

Dalam penyediaan informasi subjek AB menjelaskan:

Misalkan dalam diseminasi laporan Bank Indonesia, jika ada keterkaitan kita juga undang UMKM baik dari binaan maupun naungan dari pemerintah dan dikasih tahu, termasuk saat pemberian bantuan pelatihan mencakup pemberian informasi, ketika

⁶⁹ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

pemberian informasi Bank Indonesia juga bekerja sama dengan dinas terkait misal Dinas UMKM, Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).⁷⁰

Penyediaan informasi yang diberikan oleh Bank Indonesia bisa diakses untuk umum, perbankan, *stakeholder*, maupun UMKM itu sendiri, dalam pemberian informasi Bank Indonesia bekerja sama dengan dinas UMKM, pertanian, dan BPS, untuk memperoleh data agar akurat dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menanyakan informan kedua bapak ST UMKM yang bukan binaan Bank Indonesia bergerak di bidang kerajinan seni ukir kayu khas Kalimantan, tentang bantuan apa yang pernah didapatkan menjelaskan:

Pernah mendapatkan bantuan pelatihan dari Bank Indonesia tentang seminar *UMKM Go Digital* bersama Buka Lapak, disana saya mendapatkan pelatihan dan informasi terkait *market place* pelatihan yang diberikan Bank Indonesia cukup bagus dengan menghadirkan tokoh yang langsung dari buka lapak, selain itu kita juga diajarkan cara melakukan promosi dengan foto produk agar lebih menarik, kegiatan pelatihan ini saya mendapatkan informasi dari dinas UMKM.⁷¹

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bapak ST pernah mengikuti pelatihan, walaupun beliau bukan binaan Bank Indonesia. Pernah mengikuti pelatihan *UMKM Go Digital* tentang *ecommerce* cara melakukan promosi melalui media *online*, foto produk dan pembuatan *market place* yang langsung diberikan oleh pemateri Buka Lapak. Bapak

⁷⁰ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020.

⁷¹ Wawancara dengan informan ST tanggal 11 Juli 2020

ST mendapatkan informasi pelatihan dari dinas UMKM, sebagai UMKM yang terdaftar di kota Palangka Raya.

Berdasarkan data diatas peneliti juga memberikan pertanyaan kepada informan binaan Bank Indonesia ibu AW sebagai pelaku UMKM yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Palangka Raya, apa saja bantuan yang pernah diterima dari Bank Indonesia, AW menjelaskan:

Kita masuk menjadi binaan BI ini sejak 2017, jadi untuk penelitian belum yang kita terima saat ini berupa bantuan peralatan, pendampingan, pemasaran juga dibantu melalui event-event promosi, bazar pameran, kemudian pelatihan online juga diikuti.⁷²

Tambahan informan AW menjelaskan kelompok UMKM ini pernah mendapatkan bantuan peralatan, pendampingan, pemasaran melalui kegiatan bazar atau pameran, dan pelatihan secara online, sedangkan untuk penelitian kelompok UMKM AW belum pernah mendapatkan.

Subjek 2

Nama : AD

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Penasehat FPPU

Hasil wawancara dengan subjek AD yang merupakan pegawai Kantor Bank Indonesia (KPw BI) Prov. Kalimantan Tengah yang melaksanakan program bantuan teknis peneliti menanyakan apa saja bentuk bantuan teknis kemudian dijelaskan sebagai berikut:

⁷² Wawancara dengan informan AW tanggal 12 Juli 2020

Bantuan teknisnya itu berupa peningkatan keterampilan. Misal kekelompok tani, program Bank Indonesia ini kan ada pengembangan klaster ketahanan pangan tujuannya untuk pengendalian inflasi jadi didalamnya itu ada bantuan teknis untuk UMKM dibidang ketahanan pangan diantaranya yaitu berupa pemberian pelatihan dengan mendatangkan tenaga ahli baik dari kalangan ahli maupun praktisi kemudian juga terkait panduan sarana dan prasarana pendukungnya seperti peralatan produksi, kemudian misalkan ada pemberian alat pertanian seperti traktor dan sebagainya kemudian ada sarana bantuan pupuk dan kelengkapan sarana lain. pada tahap awal UMKM diberikan proyek percontohan. Kalo UMKM non ketahanan pangan misalkan kerajinan rotan olahan makanan dan sebagainya itu biasanya diberikan bentuk bantuan peralatan produksi pemberian pelatihan misalkan pemasaran dan sebagainya akses ke *digital* termasuk juga fasilitasi sarana promosi, karena BI juga sering mengikutkan para pelaku UMKM ini diajangan pameran yang sering diadakan oleh BI baik itu ditingkat lokal Kalimantan tengah maupun diajangan kawasan timur Indonesia ataupun ditingkat nasional.⁷³

Dapat dipahami dari wawancara diatas bantuan teknis merupakan peningkatan keterampilan dari pelaku usaha. Bank Indonesia memiliki program pengembangan klaster ketahanan pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi jadi didalamnya terdapat bantuan teknis. UMKM bidang ketahanan pangan misalnya petani bantuannya berupa pemberian pelatihan dengan mendatangkan tenaga ahli baik dari kalangan ahli maupun praktisi. Pemberian berkaitan langsung dengan bantuan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan produksi alat pertanian traktor, pupuk, dan kelengkapan sarana lain. Pada tahap awal UMKM diberikan proyek percontohan yang disebut juga dengan pemberian demplot (*demonstration pilot*). UMKM non ketahanan pangan misalnya kerajinan rotan, olahan makanan dan sebagainya pemberian bantuan juga diberikan

⁷³ Wawancara dengan subjek AD tanggal 28 Juli 2020

dalam bentuk bantuan peralatan produksi, pelatihan pemasaran dan akses digitalisasi, fasilitasi sarana promosi, selain itu Bank Indonesia juga sering mengikutkan pelaku UMKM ini diajang pameran yang diadakan oleh Bank Indonesia baik ditingkat lokal Kalimantan Tengah maupun diajang kawasan Timur Indonesia ataupun nasional.

Subjek 3

Nama : IO

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

Peneliti menanyakan kewajiban pembiayaan kepada subjek IO tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan perbankan umum untuk melakukan pemberian pembiayaan/kredit sebesar 20% menjelaskan:

Maksud dari 20% kredit yang disalurkan itu harus ke UMKM gak hanya ke perusahaan gede tok jadi ke UMKM juga harus diberikan, ya kadang mereka di bawah misalkan 19% tapi wajar sih karena UMKM itu sebenarnya bagi perbankan merupakan hal yang sulit, sulitnya kenapa karena misalnya kamu minjemin perusahaan misalnya 50 miliar nah kalo umkm kan pinjamnya 50 jt secara tetap sedangkan kalo perusahaan kan cuman satu, sedangkan UMKM aja kan berarti harus mengawasi 100 umkm dengan kemungkinan mereka pailid juga dengan analisa haga kesulitan, cuman memegang patokan 20% itu mereka bisa lebih atau kurang, untuk sosialisai peraturan ini ke perbankan, *will educated* ga perlu disosialisai karena peraturannya sudah lama, kalo ga sampai 20 persen paling di surati atau di datengin audiensi di tanyakan kenapa.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan subjek IO tanggal 4 Juli 2020

Penjelasan objek IO diatas dipahami bahwa kewajiban perbankan umum dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% yang berarti tidak hanya kepada perusahaan besar. Pada implementasinya terdapat kendala dan kesulitan perbankan umum dalam menyalurkan dana kepada UMKM sehingga terkadang bisa kurang atau lebih untuk memenuhi target sebesar 20%, beberapa kemungkinan UMKM lebih mudah mengalami pailid ketimbang perusahaan besar. Kebijakan ini sudah dijalankan lama sehingga perbankan tidak ada sosialisasi kembali. Sebagai bentuk pengawasan Bank Indonesia yang membuat kebijakan akan mengeluarkan surat peringatan dan mengadakan audiensi menanyakan kendala yang dialami perbankan.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti kemudian menanyakan informan bapak AS dari bank BRI Syariah Cabang Palangka Raya tentang kewajiban pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% menjelaskan:

Dari total OS kita mikro dan reguler itu sudah mencapai dan mencangkup total pembiayaan, yang dikucurkan oleh bank A terkait kebijakan kewajiban pembiayaan 20% kepada UMKM. Untuk nasabah sendiri bervariasi tidak salah satu objek usaha saja beragam, semua segmen kita akomodir, misalnya tadi ada usaha tahu, selama kredibilitas mereka layak mendapatkan pembiayaan dari kita karena kita mempunyai persyaratan sendiri.⁷⁵

Penjelasan informan AW, dari bank BRI Syariah Cabang Palangka Raya dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dari total OS mikro dan regular sudah mencapai 20%. Nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan juga bervariasi. Tidak hanya satu objek usaha saja seperti

⁷⁵ Wawancara dengan Informan AS tanggal 4 Juli 2020.

usaha tahu, selama kredibilitas UMKM memenuhi syarat yang diberikan bank BRI Syariah Cabang Palangka Raya maka dapat diberikan pembiayaan.

Tambahan informan pak DN dari bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya menjelaskan:

Nah untuk itu mba kami mengadakan kegiatan UMKM itu terkait peraturan Bank Indonesia kan, bahasa itunya kami mendapat surat yang mewajibkan berapa persennya pembiayaan kepada UMKM makanya sekarang kami lebih ke produk modal kerjanya mikro yang besarnya dibawah limaratus juta, kalo sekarang mah UMKM memang susah dalam mengajukan pembiayaan dibank kayak dikami seperti di mikro minimal sudah berjalan dua tahun, kemudian masalah jaminan kami meminta jaminannya berbentuk fix asset berupa SHM karena terkadang tidak bisa itu. Kedua, kemudain dari segi administrasinya UMKM ini kan masalah administrasinya pencatannya masih manual kemudian rekap penjualan masih manual kemudian dibikinkan, kami yang buat dan ternyata menjadi boomerang setelah audit dari kami menemukan temuan tidak segitu omset kami, sedangkan perbankan diminta rinci tuh laporan neraca dari 3 tahun terakhir, pendapatan pengeluaran, kemudian laba berapa, pendapatan bersih berapa, nah untuk UMKM beberapa yang sudah besarkan sudah punya, nah kalo yang masih awal itu kesulitannya untuk di bank, dan juga kebanyakan informasi terkait debitur kadang namanya dipakai keluarganya, atau nama dia sendiri yang macet, kalo diperbankan tuh kalo sudah masuk kategori macet kan otomatis datanya dicek melalui sistem, jadi mohon maaf data yang anda masukan tidak bisa dilanjutkan karena terdapat tunggakan.⁷⁶

Hasil wawancara di atas informan menjelaskan perbankan B dalam memenuhi Peraturan Bank Indoensia (PBI) tentang kewajiban kepada UMKM juga melakukan pelatihan untuk mendorong perkembangan pelaku usaha dan meningkatkan pembiayaan prodak mikro yang dibawah

⁷⁶ Wawancara dengan Informan DN tanggal 13 Juli 2020

lima ratus juta. Kesulitan dari segi UMKM yang dirasakan perbankan ialah pertama, jaminan yang diminta berupa fix asset, berupa SHM yang tidak bisa dipenuhi. Kedua, administrasi UMKM yang masih awal pencatatan dan rekap penjualan secara manual, kemudian ada upaya perbankan untuk membantu membuat namun sering terdapat temuan pendapatan yang tidak sesuai kenyataan, sedangkan perbankan membutuhkan tiga bulan laporan terakhir UMKM. Ketiga, dari segi informasi debitur yang namanya sudah pernah digunakan saudara atau keluarganya yang terindikasi macet olah sistem sehingga tidak bisa dilanjutkannya proses pembiayaan.

2. Bagaimana Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya?

Subjek 1

Nama : AB

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan :Pegawai Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM
(FPPU)

Untuk mengetahui rumusan implementasi bantuan teknis peneliti menanyakan terkait bagaimana implementasi pemberian bantuan teknis kemudian subjek AB menjelaskan:

Kami kan biasanya mengadakan rapat dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari situ kami mendapatkan informasi UMKM yang bisa di bantu atau kami cari sendiri UMKM nya, untuk melakukannya bisa kapan saja sewaktu waktu namun menyesuaikan kebutuhan

langkah selanjutnya kami melakukan kegiatan monitoring yang sekaligus pelaksanaan pengawasan disitu kami melihat apa kah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diminta oleh Bank Indonesia kemudian dilakukan setiap bulan dan tergantung permintaan UMKM nya, waktu dalam pemberian bimbingan yaitu selama 5 tahun atau bisa lebih, sesuai dengan kemampuan setelah itu bisa dilepas.⁷⁷

Subjek AB menjelaskan KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pemerintah yang disebut juga dengan Tim Pengendali Daerah (TPID) untuk mencari UMKM yang siap dibantu pemberian bantuan teknis. Kemudian pemberian bantuan teknis tidak memiliki waktu sehingga bisa dilakukan kapanpun menyesuaikan permintaan UMKM, selanjutnya UMKM yang mengajukan permintaan akan dilakukan monitoring apakah sudah sesuai dengan kondisi dilapangan dan persyaratan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Monitoring sekaligus pengawasan juga dilakukan setiap bulan kepada UMKM setelah mendapatkan bantuan, berbeda dengan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) setelah diberikan bantuan tidak dilakukan pemantauan rutin. Bagian Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) melalui dinas terkait juga mencari UMKM yang bisa dibantu dalam mengembangkan usahanya. Waktu untuk melakukan pembinaan kepada UMKM menurut peraturan Bank Indonesia dilakukan selama lima tahun, namun jika dirasa UMKM tersebut belum mampu atau masih memerlukan bimbingan bisa lebih, selain itu ketika lepas dari bimbingan Bank Indonesia perkembangan UMKM tersebut juga akan terus dipantau.

⁷⁷ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

Berdasarkan wawancara diatas peneliti kembali menanyakan kepada informan AW terkait bagaimana bantuan bimbingan yang pernah didapatkan:

Kita bisanya disamperin gitu ya, ditanya apa kesulitannya, ada informasi terbaru disampaikan kekita yang berkaitan dengan UMKM, kayak kemarin kita diberikan arahan atau bimbingan untuk, sistem pembayaran online, kemudian dibantu untuk mendapatkan kode QRIS, dibantu untuk mendapatkan informasi-informasi pelatihan.⁷⁸

Hasil wawancara diatas informan AW selaku UMKM binaan mendapatkan bimbingan dengan monitoring yang dilakukan unit Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian menanyakan kendala atau kesulitan yang dialami saat itu dalam mengembangkan usaha, mendapatkan arahan atau bimbingan terkait sistem pembayaran *online* dan dibantu untuk mendapatkan *Quick Respon Code (QRIS)* alat pembayaran yang menggunakan *scan code* yang berstandar dari Bank Indonesia, dan mendapatkan informasi terkait pelatihan-pelatihan *online*.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek AB terkait kriteria UMKM yang mendapat bantuan teknis:

Kriteria untuk mendapatkan bantuan teknis harus berkelompok, produknya sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia komoditas *volatile food* dan produk khas daerah, terus kita survei lagi sesuai gak sama yang diajukan.⁷⁹

Kriteria yang yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu UMKM harus memiliki kelompok sehingga tidak individu yang mendorong

⁷⁸ Wawancara dengan Informan AW tanggal 12 Juli 2020.

⁷⁹ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

perekonomian daerah, tentunya bantuan yang diberikan bentuknya besar dan mampu dirasakan oleh banyak UMKM. Produk yang dihasilkan atau yang diolah berbentuk *volatiles food* dan khas daerah.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti kembali menanyakan informan kedua bapak ST tentang mengapa tidak menjadi binaan Bank Indonesia, beliau menjelaskan sedang mengajukan pembuatan kelompok usaha yang bekerja dibidang kerajinan ukir kayu di Kota Palangka Raya sehingga nantinya dapat memudahkan para pelaku usaha mendapatkan bantuan bimbingan dari Bank Indonesia.

Peneliti kembali menanyakan terkait pemberian fasilitasi objek AB menjelaskan:

Dalam pemberian bantuan fasilitasi akses legalitas kepada UMKM akan tetapi Bank Indonesia tidak membantu dalam pembayaran administrasi pendaftaran atau untuk memperoleh legalitas itu misalnya dalam syarat untuk memenuhi legalitas ada yang kurang jadi kita bantu untuk memenuhi, atau kita mendatangkan seorang pakar dibidangnya untuk menjelaskan.⁸⁰

Dijelaskan bahwa pemberian fasilitas akses legalitas kepada UMKM Bank Indonesia hanya membantu memenuhi syarat yang belum terpenuhi, seperti ingin mengajukan sertifikasi halal, sarat yang belum terpenuhi akan di bantu oleh unit FPPU.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti kembali menanyakan kepada informan AW terkait fasilitasi berupa bantuan legalitas yang pernah didapatkan mejelaskan:

⁸⁰ Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

Ada, kebetulan tahun ini kami ingin mendapatkan izin edar BPOM MD untuk makanan basah, kemudian beberapa produk yang menuju legal halal, nah dari persyaratan sedang mengadakan legalitas untuk, untuk mendapatkan izin edar BPOM MD itu kita memerlukan sarana dan prasarana yang kita belum mampu mengadakan nah dari BI itu ada bantuan sedang dalam proses, seperti sebelumnya peralatan kita masih manual, ditahun 2017 kita dapat bantuan peralatan otomatis membantu dari segi sarana prasarana.⁸¹

Informasi yang diberikan informan AW berarti mereka mendapatkan fasilitasi bantuan akses mendapatkan legalitas, seperti saat mendapatkan izin BPOM MD yang sedang diajukan beberapa persyaratan yang tidak bisa di penuhi oleh kelompok UMKM berupa sarana dan prasarana yang harus sesuai dengan SOP sedang dalam proses pengajuan dan pemenuhan bantuan oleh Bank Indonesia.

Subjek AB menambahkan kendala dari setiap bantuan.:

Kendala dari semua pemberian bantuan teknis ya tergantung UMKM nya sendiri benar-benar menyerap yang diberikan oleh narasumber itu atau tidak, dan misalnya karena jarak posisi Kalimantan Tengah kan luas nih jadi jangkauannya susah.⁸²

Kemudian penjelasan terkait kendala pemberian bantuan teknis ialah tergantung kemampuan UMKM dalam memahami serta menyerap materi pelatihan yang telah didapatkan dan terkadang jarak antar daerah se-Kalimantan Tengah yang jauh di jangkau juga menjadi kendala. Setelah tidak lagi memberikan bantuan kredit likuiditas namun dalam mengembangkan UMKM di Kota Palangka Raya Bank Indonesia juga meningkatkan peran bank umum.

⁸¹ Wawancara dengan Informan AW tanggal 12 Juli 2020

⁸² Wawancara dengan subjek AB tanggal 3 Juli 2020

Subjek 2

Nama : AD

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Staf Unit Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
(FDSEK)

Subjek AD menjelaskan implementasi dalam memberikan bantuan yang diinginkan oleh UMKM dijelaskan:

Dalam pemilihan UMKM yang diberikan bantuan teknis kan pertama ada tahapannya didalam pemilihan klaster UMKM antara lain untuk UMKM bidang ketahanan pangan dia itu harus berkontribusi terhadap pengendalian inflasi ini seiring dengan tugas BI untuk menjaga inflasi jadi komoditi yang terkait itu ada cabe merah kemudian ada bawang merah, padi, ternak daging, ayam nah itu setelah identifikasi awal, dapat nih kriteria yang terkait dengan penunjang inflasi kemudian BI akan berkoordinasi dengan dinas untuk menentukan kira-kira pelaku UMKM mana yang memiliki potensi dibina dalam artian pertama harus memiliki kelompok jadi misalnya petani harusnya punya kelompok tidak bisa dengan cara sendiri-sendiri jadi kita minta saran kedinas kelompok mana yang memiliki potensi untuk dibina dari segi kelompoknya harus aktif kesesuaian kondisi tempat dan potensi misalkan kelompok pengembangan untuk cabe memang lokasinya itu memiliki potensi untuk di kembangkan itu, sama juga dengan komoditi yang lain. sama juga dengan UMKM yang memiliki andil dalam pengendalian inflasi. Selanjutnya kita koordinasi dengan Dinas UMKM untuk sama-sama menentukan dalam artian dinas memberikan mana yang memiliki potensi dalam artian BI menilai yang cocok dalam sisi kelompoknya potensi pengembangannya dan sebagainya itu.⁸³

Pemaparan bapak AD diatas dapat dipahami bahwa dalam memberikan bantuan teknis Bank Indonesia memiliki kriteria tersendiri. Kriterianya UMKM harus berbentuk kelompok/ *comodity*, bentuk

⁸³Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

usahanya memiliki kriteria pertama, berupa penunjang Inflasi atau disebut juga dengan UMKM ketahanan pangan misalnya petani padi, bawang cabe, pertanian bidang peternakan daging dan ayam, kedua UMKM non ketahanan pangan yang memiliki ciri khas daerah seperti rotan, ukiran, batik, dan olahan makan khas daerah. Kriteria selanjutnya UMKM berada dibawah naungan pemerintah atau sudah memiliki izin. Dari kriteria diatas tahapan awal Bank Indonesia akan melakukan seleksi kepada UMKM sesuai dengan kriteria tersebut. Selanjutnya dilakukan monitoring, untuk melihat dari segi potensi usaha dan kondisi yang sesuai tempatnya dengan tujuan ketika menyalurkan bantuan dan dalam masa perkembangannya dapat tepat sasaran. Kemudian pemberian bantuan teknis yang sesuai dengan permintaan para pelaku usaha. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyampaikan saran UMKM yang berpotensi dibantu sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian peneliti menanyakan kriteria Bapak AD menambahkan:

Terdapat kriteria UMKM aktif itu maksudnya berarti UMKM masih dalam pembinaan Bank Indonesia nah jadi dari tahap awal mulai pembinaan itu biasanya diberikan waktu 3-5 tahun dan mereka terus diberikan pendampingan. Sedangkan UMKM semi aktif itu biasanya yang sudah lepas dari 3 tahun dan hanya dimonitor seperti itu mereka sudah bisa mulai tidak diberikan pendampingan masih dilakukan koordinasi tetapi tidak terlalu intens. Di dinas itu ada kelompok tani yang sudah terdaftar itu bisa dan lebih diutamakan tetapi kalo itu belum terdata di dinas namun mereka sudah pernah mengerjakan secara kelompok mereka itu masih bisa di bina dan nanti akan difasilitasi pembentukan kelompok dulu ketika itu sudah bisa

terbentuk yang istilahnya anggotanya itu semangat untuk memiliki komitmen berkembang bersama.⁸⁴

Berdasarkan tambahan informasi diatas dalam melakukan pembinaan terdapat UMKM aktif dan semi aktif. UMKM aktif berarti masih dalam pembinaan selama 3 sampai 5 tahun, setelah itu UMKM yang sudah mampu berkembang sendiri akan di lepas namun tetap dilakukan koordinasi yang disebut juga dengan UMKM semi aktif. Penerima bantuan teknis lebih diutamakan UMKM yang sudah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari dinas terkait. Akan tetapi UMKM yang sudah berjalan atau berkembang bersama secara kelompok namun belum terdaftar didinas dan memenuhi kriteria juga dapat dibantu oleh Bank Indonesia baik bantuan teknis maupun saran dan arahan.

Selanjutnya bapak AD juga menambahkan tentang UMKM yang ingin mengajukan bantuan teknis:

Bisa saja tetapi dia harus yang terkait kriteria pengendalian inflasi, dan dukungan dari dinas, koordinasi juga berjalan dengan rapat dengan tim pengendali daerah, dari rapat itu perwakilan daerah mengusulkan atau menyampaikan ke Bank Indonesia potensi usulan dari masyarakat UMKM yang bisa dibantu, atau bisa juga Bank Indonesia yang mencari langsung bisa langsung mengajukan proposal itu sesuai dengan terkait potensinya bagus.⁸⁵

Pernyataan diatas bapak AD ada kemungkinan UMKM melakukan pengajuan bantuan teknis yang menyesuaikan syarat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, akan tetapi lebih diutamakan yang sudah tercatat kelompok usahanya di dinas terkait.

⁸⁴ Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

⁸⁵ Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan bantuan teknis yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada subjek AD tentang fasilitasi dijelaskan:

Bank Indonesia memberikan bantuan fasilitasi untuk kemudahan akses perkembangan UMKM salah satunya berbentuk kalo legalitas usaha itu BI memfasilitasi misalkan mendatangkan narasumber untuk memberika penjelasan ke petani maupun UMKM terkait akses itu misalkan untuk sertifikasi halal dan perizinan memberikan fasilitasi semacam edukasi tetapi tidak memberikan pembiayaan, membiayai sertifikasi, tetapi mejelaskan kepada masyarkat bagaimana proses serifikasi halal itu alurnya seperti apa, apa saja yang harus dipenuhi oleh UMKM ini Bank Indonesia mengedukasi semacam sosialisai atau pelatihan yang mendatangkan pemateri ahli dibidangnya.⁸⁶

Hasil wawancara diatas tepat dipahami Bank Indonesia memberikan bantuan teknis berupa fasilitasi guna mempermudah perkembangan UMKM jenis fasilitasnya bisa berbentuk akses legalitas seperti pemenuhan sertifikasi halal atau BPOM atau lainnya Bank Indonesia menghadirkan tenaga ahli atau pakar dibidangnya untuk memberikan pengarahan alur mendapatkan serifikasi tersebut. Akses legalitas tersebut Bank Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk membayarkan administrasi, hanya berupa sosialisai atau edukasi kepada masyarakat dan UMKM tentang proses legalitas.

Selanjutnya peneliti menanyakan kendala dalam pemberian Bantuan teknis, kemudian Bapak AD menjelaskan:

Sering menjadi kendala misalnya UMKM ketahan pangan pertanian itu terjadi kendala permasalahannya dicuaca jadi misalkan pemberian terkait budidaya cabe pelatihan saprodi dan sebagainya terkendala cuaca yang harusnya hasilnya bisa maksimal ini jadi kurang maskimal jadi kendala, kemudian terkait UMKM non ketahanan

⁸⁶ Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

pangan misalkan dalam pemberian pelatihan pemasaran *online* atau *onboarding*, pemasaran online itu perlu ketelatenan oleh para pelaku UMKM ini yang terkadang pada awal bisa mereka melakukan cuman perkembangannya itu tidak terlalu cepat mlakukan pemasarnya akhirnya mereka kembali lagi ke *offline*.⁸⁷

Penjelasan subjek AD diatas ada dua macam kendala yang dihadapi saat pemberian bantuan teknis. Pertama, UMKM ketahanan pangan contohnya adalah petani terkendala cuaca hasilnya menjadi tidak maksimal. Kedua, UMKM non ketahanan pangan contohnya pengerajin rotan atau olahan pangan terbatasnya pemahaman sehingga setelah pelatihan kurang dalam pengimplementasiannya.

Peneliti kembali menanyakan lama waktu pemberian bantuan teknis serta bagaimana sistem pengawasannya, kemudian subjek AD menjelaskan:

Pemberian bimbingan sampai 3-5 tahun selama bimbingan itukan BI memberikan bantuan teknis itu mulai tahapan hulu hingga hilir dari input sampai dia bisa hilirasi produk jadi misalkan pengembangan cabe misalkan ditahun pertama dia fokus dibidang budi daya, ditahun kedua bagaimana menguatkan bidang kelembagaan bagaimana membentuk akes pasar dan kepermodalan ditahun ketiga fokus terkait hilirisasi produk turunan dari produk, bagaimana mengatasi permintaan pasar besar tapi hasilnya kecil maka harus ada langkah-langkah untuk membuat produk turunan. Selama 3-5 setelah itu dikenal dengan nama *pashing out* itu UMKM itu sudah tidak lagi diberikan pendampingan untuk pendampingan selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah.⁸⁸

Hasil wawancara dengan bapak AD dapat dipahami terdapat pembatasan waktu dalam melakukan pembinaan kepada UMKM yakni selama 3 sampai 5 tahun. Pemberian bantuan dilakukan dari hilir atau

⁸⁷Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

⁸⁸Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

input sampai dengan hulu atau *output* sampai UMKM mampu menghasilkan produk yang unggul. Pelaksanaanya juga terdapat tahapannya contohnya ditahun pertama fokus dibidang budidaya, ditahun kedua fokus dibidang penguatan kelembagaan untuk mencari akses pasar dan permodalan usaha, ditahun ketiga fokus dibidang hilirisasi produk atau produk turunan untuk mengatasi pendapatan yang kecil namun permintaan pasar yang besar, setelah 3 tahun atau lima tahun UMKM disebut juga dengan *pashing out* dimana sudah tidak lagi mendapatkan pembinaan lalu diserahkan kepada pemerintah daerah, namun tetap dilakukan koordinasi.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada subjek AD tujuan pemberian bantuan teknis kepada UMKM:

Targetnyakan ini secara Bank Indonesia melakukan pengendalian inflasi supaya terjaga, inflasi itu kan terjadi karena kekurangan pasokan atau kekurangan *suplay* dan bahan baku makanya Bank Indonesia dalam pendampingan ke petani mengamankan *suplay* produksi agar produksi itu bisa terus meningkat, selain itu juga harapan petani ini dengan diberikan pembinaan sehingga mereka bisa terampil untuk meningkatkan produksi dari segi teknologi akhirnya mereka mempunyai skill untuk meningkatkan produksi ini bisa dengan dua cara dengan teknologinya bagus dan perluasan lahan mereka bisa bertambah sehingga produksinya bisa meningkat dan ekonominya meningkat otomatis perekonomian masyarakat dikawasan tersebut bisa tumbuh dan semakin kuat, menstabilkan ekonomi dan menstabilkan ekonomi masyarakat, kualitas UMKM bagus punya sertifikasi dan pemasaran semakin luas, permintaan pasar tinggi dan ekonomi meningkat.⁸⁹

Hasil wawancara dengan subjek AD dapat disimpulkan tujuan Bank Indonesia dalam memberikan bantuan teknis adalah upaya mengendalikan inflasi yang terjadi karena kelangkaan bahan baku untuk *suplay*. Hasil

⁸⁹ Wawancara dengan subjek AD tanggal 29 Juli 2020

yang didapatkan UMKM selama mendapat pembinaan mampu menambah *skill*, keterampilan dalam mengelola teknologi, produk yang tersertifikasi, dan semakin luasnya pemasaran. Dengan begitu produksi meningkat seiring dengan perekonomian, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat yang berada disekitarnya.

Subjek 3

Nama : IO

Jenis kelamin: Laki-Laki

Jabatan : Staf Unit Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK)

Hasil wawancara dengan subjek IO yang juga merupakan staf pegawai Bank Indonesia unit Fungsi Data dan Statistik Eonomi dan Keuangan (FDSEK) peneliti menanyakan tentang Bank Indonesia yang mewajibkan pembiayaan kepada Bank umum meningkatkan pembiayaan kepada perbankan dalam mengembangkan UMKM menjelaskan:

Sebenarnya bukan kita sebagai intermediasi perbankan, cuman gini pengembangan kita ke UMKM itukan ada beberapa aspek, aspek pemasaran aspek produksi, termasuk aspek keuangan juga kita itu mau mendorong *financial inklusi* inklusi keuangan di Indonesia karena tiap orang kan punya tabungan atau rekening di bank kan sedikit apa lagi yang punya UMKM untuk inklusi keuangan ini contohnya misalnya kita kan ngajarin mereka bikin laporan keuangan sederhana dan kita kembangin mereka dari pemasaran, produksi, terus kadang kita perkenalkan juga nih keperbankan ini UMKM binaan monggo dianalis kayaknya mereka butuh pinjaman sekian, yah itu nanti merka urusin sendiri yang penting kita cuman mendorong aja sih.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan subjek IO tanggal 4 Juli 2020

Hasil wawancara objek IO menjelaskan Bank Indonesia bukan menjadi intermediasi bank umum ke UMKM, namun untuk menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong *financial inclusion*, beberapa aspek dalam mengembangkan UMKM adalah aspek produksi dan aspek keuangan, sehingga kebijakan Bank Indonesia dapat cepat dirasakan sampai ke masyarakat. Bank Indonesia mencoba untuk mendorong UMKM yang belum memiliki kredit ataupun tabungan perbankan, karena saat ini masih dirasa cukup rendah. Selain itu juga mengadakan pelatihan untuk membuat pelaporan keuangan sederhana, kemudian mengembangkan produksi dan pemasaran serta memperkenalkan UMKM binaan kepada perbankan untuk mempermudah mendapatkan akses pembiayaan.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti juga menanyakan kepada tambahan informan bapak AS dari bank BRI Syariah Cabang Palangka Raya terkait adakah informasi atau bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan:

Kita sempat mendapatkan kegiatan *gathering* temu akbar 1000 UMKM, cuman acara tersebut tidak berlanjut seperti itu fakum sepertinya, tidak ada tindak lanjut yang lebih, mengarahkan mereka UMKM jadi diberikan ke bank sendiri untuk mengelola nasabah-nasabahnya, tidak ada pembelajaran lanjutan.⁹¹

Penjelasan dari hasil wawancara bersama Informan AS dari bank BRI Syariah Cabang Palangka Raya pernah menghadiri undangan dari Bank Indonesia dalam kegiatan *Gathering* Temu Akbar 1000 UMKM. Namun

⁹¹ Wawancara dengan Informan AS tanggal 11 Juli 2020

setelah acara tersebut tidak ada tindak lanjut dari Bank Indonesia untuk mengarahkan UMKM kepada perbankan umum. Semua kembali kemasing-masing perbankan umum dalam mengembangkan UMKM atau nasabah mereka. Kemudian tidak ada pembelajaran lanjutan terkait pembukuan atau pencatatan pelaporan akuntansi sederhana untuk UMKM. Peneliti kembali mewawancarai Informan tambahan bapak DN dari bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya, tentang adanya pemberian bantuan atau informasi terkait UMKM di Kota Palangka Raya menjelaskan:

Kalo selama saya selama di Bank B pemberian informasi terkait UMKM sudah tiga kali mengikuti acara BI yang mengadakan itu mengumpulkan UMKM, cuman kita itu gak dikasih datanya, hanya diundang secara langsung, jadi yang menghadiri diundang itu ada UMKM, perbankan, dinas-dinas UMKM, dinas koperasi, sama vendor yaitu itu agen pemasaran, agen promosinya, namun untuk data secara langsung kita ga dikasih sih, cuman untuk akses pertemuan UMKM kita sudah tigakali.⁹²

Hasil wawancara diatas informan DN menjelaskan bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya mendapatkan informasi dari Bank Indonesia melalui kegiatan-kegiatan temu UMKM, yang sudah pernah diikuti selama tiga kali. Dalam kegiatan Bank Indonesia mengundang perbankan, dinas-dinas terkait UMKM kemudian ada vendor agen pemasaran atau agen promosi. Namun tidak diarahkan atau pemberian data secara langsung dari UMKM yang menghadiri kegiatan tersebut.

Informasi tambahan oleh objek IO tentang pengawasan Bank Indonesia berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan:

⁹²Wawancara dengan subjek DN tanggal 13 Juli 2020

Dalam ekonominya kita ada istilah makroprudensial analoginya kan gini ada sebuah hutan nah kalo BI itu ngawasinya hutan secara keseluruhan dan kalo OJK kesehatan ekosistemnya kita lihatnya sistem perbankannya melihat bank besar yang mempengaruhi bank bank lain nah itu kita bisa masuk juga cuman kalo mengawasi bank A sehat, bank B sehat, nah itu kita gak sedetail itu kayak helikopter *view*, kalo misalnya bank itu kita identifikasi berdampak sistemik kayak dia kolaps yang laik ikut kolaps gitu nah itu kiata juga bisa masuk kepengawasannya tapi kayak kapasistas dia untuk membayarkan.⁹³

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial yakni pengawasan secara luas, terkait kesehatan bank yang besar melalui sistemnya dalam artian kesehatan bank dapat mempengaruhi bank-bank lainnya. Seperti jika diketahui suatu perbankan yang besar akan terjadi kolaps dan berdampak sistemik kepada perbakan lainnya namun, bukan kapasitas Bank Indonesia dalam membayarkannya tanggungan perbakan yang mengalami kolaps tersebut. Sedangkan pengawasan OJK secara khusus melihat kesehatan ekosistemnya bank A kemudian bank B.

Tambahan Informasi oleh subjek IO terkait pelaporan yang dilakukan bank Umum kepada Bank Indonesia mejelaskan:

Laporan bulanan ada, ke Bank Indonesia dalam bentuk sistem jadi mereka *upload* ke sistem, kita melakukan pengawasannya itu ke kantor pusat misalnya di Kal-teng ada Bank Kal-teng ya kita ikut membantu pengawasannya ke Bank Kal-teng ya ga secara detail kan ga semua peraturan BI itu yang misalnya rasio kredit UMKM nya minimal 20% kalo kurang dari itu kita datengin kita kasih tau semua bank, kalo di Kalteng kantor pusatnya Bank Kalteng tergantung kantor pusat bank umumnya. Kalo data semua ada ga hanya kantor pusat yang cabang juga ada penyampaian laporan secara online. Kalo tidak terjadi pelaporan maka akan didenda kalo pun mereka ada koreksi, misalnya koreksinya telat melebihi itu mereka juga kena denda

⁹³Wawancara dengan subjek IO tanggal 4 Juli 2020

kecuali koreksinya dari auditor gak, kalo koreksinya dari mereka sih iya kena denda.⁹⁴

Bank Indonesia mewajibkan pelaporan bulanan atau pertahun pembiayaan bank umum secara *online* melalui sistem. Pengawasan perbankan umum oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah hanya dilakukan pada kantor pusat saja, misalnya saat ini di kota Palangka Raya terdapat kantor pusat Bank Kalteng, KPw Bank Indonesia hanya mengawasi itu. Sedangkan untuk bank yang berada di kantor cabang juga melakukan pelaporan secara *online*. Jika perbankan tidak melakukan pelaporan akan dikenakan denda dan bila terjadi koreksi pada pelaporan yang dilakukan oleh audit *internal* perbankan yang melebihi batas waktu akan dikenakan denda juga, kecuali dilakukan oleh audit *eksternal*.

C. Analisis Data

Pembahasan tentang implementasi bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan peneliti uraikan dalam sub bab ini, sesuai dengan rumusan masalah yang dibagi menjadi dua kajian yaitu, bentuk bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya, dan implementasi bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya.

⁹⁴ Wawancara dengan subjek IO tanggal 4 Juli 2020

1. Bentuk Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya

Bantuan teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah dapat dianalisis pemberian dilakukan secara terbatas. Hasil penelitian bentuk bantuan teknis yang peneliti dapat dari hasil penelitian berupa:

a. Penelitian

Penelitian menunjukkan adanya proses bentuk siklus bersusun yang selalu berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keingin-tahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. Selanjutnya direncanakan dan dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan tersebut akan timbul permasalahan baru, sehingga akan terjadi siklus secara berkesinambungan.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara bersama subjek AB bantuan penelitian dilakukan sendiri oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada unit Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) untuk mencari potensi dan perkembangan perekonomian di Kalimantan Tengah. Kemudian hasilnya akan ditindak lanjuti lalu disampaikan sebagai pemberian informasi kepada dinas terkait seperti dinas pertanian atau dinas

UMKM. Penelitian dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM.

UMKM ketahanan pangan contohnya seperti yang pernah dilakukan kepada binaan kluster petani cabai yang ingin mengembangkan bibit unggul dan juga kepada UMKM non ketahanan pangan seperti pengerajin rotan atau pengerajin lainnya yang ingin mendapatkan bantuan penelitian. Akan tetapi diterangkan juga penelitian lebih diutamakan kepada UMKM ketahanan pangan seperti petani sebagai UMKM yang tergabung dalam kluster atau pengelompokan, dan berdampak kepada peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia kluster ini lebih diarahkan kepada *supplay* komoditas penunjang ketahanan pangan, khususnya komoditas *volatalie food*. Hal ini sebagai salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi. Pendapat subjek AB juga dikuatkan dengan beberapa data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa:

- 1) Topik penelitian adalah terkait upaya mendorong kluster pangan
- 2) Penelitian dapat dilakukan baik oleh Bank Indonesia maupun bekerja sama dengan pihak lain, antara lain kementrian/dinas/ lembaga domestik maupun internasional.

Jika dikaitkan dengan keadaan di lapangan belum terdapat UMKM binaan Kota Palangka Raya yang masuk kedalam golongan

petani atau klaster dan hanya bergerak dibidang produk khas daerah. Peneliti menambahkan analisis dari hasil wawancara dengan informan AW sebagai UMKM binaan juga menjelaskan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan penelitian, namun jika dibutuhkan nantinya maka akan diajukan.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan berbagai pembelajaran dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis kererampilan tertentu. Pelatihan ialah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu.

Dapat dianalisis pemberian pelatihan Bank Indonesia telah dilakukan dengan baik kepada UMKM. Penjelasan subjek AB menerangkan pemberian pelatihan juga menyesuaikan permintaan atau kebutuhan UMKM. Ada juga usaha KPw Bank Indonesia mencari data didinas UMKM atau dinas pertanian untuk dibantu dan mendapat pelatihan. Subjek AB menerangkan pelatihan berbentuk keterampilan seperti petani yang menginginkan cara menghilangkan hama dan UMKM dalam pemasaran *online* pernah dilakukan.

Jika dikaitkan dengan data dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa:

- 1) Pelatihan adalah upaya dalam meningkatkan kapasitas anggota klaster pangan dalam rangka memperkuat klaster pangan dan meningkatkan produktivitas serta nilai tambah usaha klaster pangan.
- 2) Pelatihan dapat diberikan dalam bentuk klasikal, studi banding dan magang serta demplot.
- 3) Pelatihan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau bekerja sama dengan pihak lain
- 4) Topik pelatihan antara lain
 - (1) Pengelolaan keuangan dan akses keuangan
 - (2) Penguatan kelembagaan
 - (3) Teknik budidaya
 - (4) Penanganan dan pengolahan paska panen
 - (5) Pemasaran
 - (6) Topik lain yang diperlukan

Tambahan informasi dari hasil wawancara dengan ibu AW selaku UMKM binaan menjelaskan pernah mendapatkan bantuan seperti yang baru saja diikuti pelatihan *on boarding*. Kemudian peneliti menanyakan informasi UMKM selain informan binaan yang berada dibawah naungan pemerintah bahwa informan ST juga senada pernah mendapatkan pelatihan *UMKM Go Digital*.

c. Pemberian Informasi

Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Fungsi informasi yaitu menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan suatu keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga memberikan standar aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan.

Pemberian informasi yang diterangkan oleh subjek AB sebenarnya saling berkaitan dalam pemberian bantuan teknis. Sama halnya dengan pelatihan juga termasuk dalam penyampaian informasi kepada UMKM. Kemudian Bank Indonesia juga memiliki data informasi yang bisa diakses melalui website oleh semua pihak baik perbankan, *stakeholder*, UMKM dan pemerintah. Pemberian informasi yang akurat bekerja asama dengan dinas terkait UMKM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika dikaitkan dengan data yang diperoleh penyediaan informasi dapat berupa kegiatan diseminasi program, hasil penelitian, statistik dan informasi lainnya terkait pengembangan Klaster Pangan yang dilakukan Bank Indonesia maupun mitra Bank Indonesia. Data

dokumentasi yang diperoleh dari bentuk bantuan penyediaan informasi ini berupa:

- 1) Sarana penyediaan informasi antara lain melalui media cetak, media elektronik, website Bank Indonesia, sosialisasi/ *workshop*/ seminar atau kegiatan sejenis lainnya.
- 2) Penyediaan informasi dapat dilakukan oleh Bank Indonesia maupun bekerja sama dengan kementerian/ dinas terkait/ lembaga domestik maupun internasional.
- 3) Dalam penyediaan informasi melalui website Bank Indonesia maka pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi komunikasi.

Peneliti mengaitkan dokumen yang diperoleh dengan keadaan di lapangan yang dikuatkan dengan penjelasan informan ST sebagai pelaku UMKM yang bukan binaan, bahwa pernah mendapatkan informasi pelatihan UMKM *Go Digital* melalui dinas terkait yang mengundang seluruh UMKM di Kota Palangka Raya. Kemudian di jelaskan juga informan AW selaku UMKM binaan selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan kegiatan UMKM.

d. Bimbingan/pendampingan

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan adalah *the process of helping individuals to understand themselves and their world*. Jadi bimbingan itu adalah sebuah proses untuk membantu orang agar mereka memahami dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya.

Sedangkan Grow mendefinisikan bimbingan sebagai pemberian bantuan oleh orang yang berwenang dan terlatih, baik kepada orang perseorangan dari segala umum untuk mengatur kegiatannya sendiri, maupun untuk mengembangkan wawasannya, mengambil keputusan, untuk memikul tanggung jawabnya. Batasan lainnya yang diberikan oleh Arthur Jones, untuk seseorang yang diberikan oleh manusia kepada manusia lain:

- a) Pertolongan itu untuk menentukan pilihan-pilihan dan penyesuaian serta untuk pemecahan masalah
- b) Adanya tujuan yang jelas

Dapat dianalisis pemberian bantuan bimbingan atau pendampingan yang dijelaskan dari hasil wawancara oleh subjek AB, hanya dilakukan kepada UMKM binaan atau yang berada di bawah pemerintah, dikarenakan Bank Indonesia memiliki kriteria tersendiri dalam memberikan bantuannya. Subjek AB menjelaskan tidak ada batasan waktu pengajuan untuk mendapatkan bimbingan atau pendampingan sehingga bisa dilakukan kapanpun, sedang batasan waktu bimbingan atau pendampingan kepada UMKM BI memiliki aturan selama lima (5) tahun. Jika dirasa mampu mandiri maka akan di lepas, namun jika dirasa kurang bisa menyesuaikan. Setelah lespun Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan UMKM tersebut.

Analisis diatas dikuatkan dengan tambahan data dokumentasi yang peneliti peroleh dari Bank Indonesia berupa:

- 1) Pendampingan merupakan kegiatan bimbingan kepada anggota klaster pangan selama periode tertentu.
- 2) Pendampingan dilaksanakan untuk memperkuat perkembangan klaster pangan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha klaster pangan
- 3) Pendampingan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau bekerja sama dengan pihak lain
- 4) Output proses pendampingan dapat berupa laporan pendampingan dan rekomendasi

Peneliti mengaitkan data diatas dengan keadaan dilapangan berdasarkan hasil wawancara bersama tambahan informan UMKM binaan ibu AW bahwa selama menjadi binaan telah mendapatkan bantuan bimbingan. Pelaksana dari FPPU selalu melakukan monitoring setiap bulannya dan memberikan arahan serta memberi informasi terkait UMKM. Selain itu ibu AW juga pernah medapatkan arahan atau bimbingan terkait sistem pembayaran *online* dan dibantu untuk mendapatkan *Quick Respon Code* (QRIS) alat pembayaran yang menggunakan *scan code* yang berstandar dari Bank Indonesia, dan mendapatkan informasi terkait pelatihan-pelatihan *online*.

e. fasilitasi

Pada saat ini, sudah banyak fasilitas yang sudah disediakan oleh berbagai pihak guna mendukung majunya usaha kecil dan menengah

(UMKM) dalam bentuk penyediaan fasilitas pelatihan, pembentukan manajemen yang andal, peralatan produksi, sampai pemasaran produk.

Seperti yang dikatakan oleh F.Drucker, proses kewirausahaan melibatkan kompleksitas potensi individual dan dukungan lingkungan secara timbal balik. Artinya masyarakat cerdas pada gilirannya akan mampu menghasilkan kewirausahaan cerdas. Mereka bukan hanya mengandalkan semangat kerja keras, namun juga pola kerja cerdas, terutama untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan global yang semakin kompetitif.

Dapat dianalisis pemberian sarana dan prasarana juga telah dilakukan oleh KPw BI Provinsi Kal-teng dengan terbatas. Bantuan ini sangat menunjang proses produksi yang lebih berkualitas dan efisien. Beberapa diantaranya yang dijelaskan oleh subjek AB seperti penyediaan bantuan akses legalitas. Dimana Bank Indonesia membantu dalam memenuhi kriteria yang belum terpenuhi namun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembayaran administrasi.

Hasil analisis di atas dikuatkan juga dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa:

- 1) Fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk kemudahan akses yang dibutuhkan dalam pengembangan klaster pangan
- 2) Jenis fasilitas antara lain
 - a) Fasilitas akses legalitas dan sertifikasi produk
 - b) Fasilitasi akses teknologi dan digitalisasi

- c) Fasilitasi akses pasar menggunakan platform dalam jaringan (*daring*) maupun luar jaringan (*luring*) antara lain melalui pameran dan *business matching*
- d) Fasilitas akses keuangan

Berdasarkan data diatas peneliti mengaitkan dengan hasil penelitian lapangan dari tambahan informan AW bahwa pemberian sarana dan prasarana pernah diberikan oleh Bank Indonesia, seperti untuk memenuhi kriteria akses legalitas BPOM para pelaku usaha sangat kesulitan, salah satunya sarana dan prasarana untuk melakukan produksi harus sesuai dengan SOP Standar Oprasional.

f. Kewajiban Pembiayaan Perbankan Umum

Dalam rangka mendorong pemberian kredit atau pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan 2014 yang sesuai dengan kemampuan Bank Umum pada tahun 2015 yang ditetapkan paling besar 5%, tahun 2016 paling rendah sebesar 10% tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.

Dapat dianalisi dari subjek IO menjelaskan Bank Indonesia bukan menjadi intermediasi bank umum ke UMKM, namun untuk menjalankan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong *financial inclusion*, beberapa aspek dalam mengembangkan UMKM adalah

aspek produksi dan aspek keuangan, sehingga kebijakan Bank Indonesia dapat cepat dirasakan sampai ke masyarakat. Bank Indonesia mencoba untuk mendorong UMKM yang belum memiliki kredit ataupun tabungan perbankan, karena saat ini masih dirasa cukup rendah. Selain itu Bank Indonesia juga mengadakan pelatihan untuk membuat pelaporan keuangan sederhana, kemudian mengembangkan produksi dan pemasaran serta memperkenalkan UMKM binaan kepada perbankan untuk mempermudah mendapatkan akses pembiayaan.

Kemudian peneliti juga mendapatkan tambahan informasi dari bapak AS yang menjelaskan pihak perbankan BRI Syariah pernah mengikuti kegiatan sebagai undangan untuk menghadiri kegiatan temu 1000 UMKM. Pihak perbankan yang hadir mendirikan *stand* untuk memperkenalkan perbankan masing-masing kepada UMKM, setelah kegiatan tersebut tidak ada tindak lanjut pelatihan kepada UMKM.

Peneliti kembali menanyakan kepada informan DN dari BNI Syariah Cabang Palangka Raya yang menjelaskan mereka juga pernah mendapatkan beberapa kali undangan dalam kegiatan UMKM. Pada kegiatan tersebut tentunya Bank Indonesia memperkenalkan langsung UMKM yang menjadi unggulan dan binaan.

Keterangan dari sumber informan perbankan diatas menguatkan bahwa Bank Indonesia juga memperkenalkan perbankan umum kepada UMKM untuk melakukan pembiayaan serta pemberian informasi terkait UMKM yang ada di Kota Palangka Raya

Objek IO menambahkan kewajiban perbankan umum dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% yang berarti tidak hanya kepada perusahaan besar. Pada implementasinya terdapat kendala dan kesulitan perbankan umum dalam menyalurkan dana kepada UMKM sehingga terkadang bisa kurang atau lebih untuk memenuhi target sebesar 20%, beberapa kemungkinan UMKM lebih mudah mengalami pailid ketimbang perusahaan besar. Kebijakan ini sudah dijalankan lama sehingga perbankan tidak ada sosialisasi kembali. Sebagai bentuk pengawasan Bank Indonesia yang membuat kebijakan akan mengeluarkan surat peringatan dan mengadakan audiensi menanyakan kendala yang dialami perbankan.

Kembali informan DN dari BNI Syariah Cabang Palangka Raya menjelaskan bahwa benar adanya kendala atau kesusahan perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM. Dilihat dari persyaratannya masing-masing perbankan memiliki kriteria atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh UMKM. Informan DN menambahkan salahsatunya kendala UMKM belum mengetahui tentang pembukuan untuk mengetahui laba rugi dari usahanya. Sehingga bantuan yang di berikan Bank Indonesia berupa pelatihan keuangan sangat di perlukan.

2. Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada UMKM di Kota Palangka Raya

Model Grindel mengemukakan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama yaitu, *content of policy and content of implementation* (isi kebijakan dan konteks implementasinya, dan *impact*). Ide dasarnya adalah setiap kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan harus dilakukan dan dampaknya harus diperhatikan.

Pelaksanaan bantuan teknis Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang dijelaskan dari hasil penelitian pada implementasi bantuan teknis memiliki tahapan-tahapan yang sama, dari dikeluarkannya peraturan kebijakan, perubahan yang diinginkan, hingga pelaksanaan program. Selain itu peneliti juga menemukan Bank Indonesia juga menguatkan modal usaha UMKM melalui kewajiban Bank Umum dalam memberikan pembiayaan berikut pembahasan dari tahapan implementasi bantuan teknis dan kewajiban pembiayaan, tahapannya meliputi:

a. Peraturan Kebijakan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketiga subjek penelitian pemberian bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kewajiban Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi serta mendukung pengembangan UMKM dalam

rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/ atau dengan kegiatan, kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012. Namun, setelah melakukan penelitian terdapat perubahan yang diatur ulang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 perubahan atas Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan bantuan teknis dan kewajiban perbankan dalam menyalurkan pembiayaan sebesar 20% berjalan. Namun dilihat kedaannya setelah peneliti terjun langsung kelapangan di Kota Palangka Raya sendiri UMKM yang menjadi binaan masih sedikit dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dibutuhkan baik sumber daya manusia maupun bahan baku yang diperoleh. Sehingga Bank Indonesia perlu mencari UMKM sampai ke pelosok daerah yang bisa mendapatkan bantuan teknis. Setelah dianalisis kembali selain bantuan teknis peneliti menemukan satu program bantuan juga berupa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Jika PSBI merupakan wujud *Corporate Sosial Responsibility* Bank Indonesia sedang bantuan teknis merupakan bantuan yang disediakan untuk menjaga prekonomian dari inflasi melalui UMKM kluster atau yang memiliki kelompok usaha unggulan.

Peneliti juga mendapatkan data Beberapa UMKM penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) juga mendapat bantuan teknis, namun beberapa penerima bantuan teknis tidak mendapat bantuan PSBI disebabkan pemberian bantuan teknis yang telah dijelaskan terbatas. Sehingga peneliti mencari tambahan informasi di Kota Palangka Raya juga terbatas berdasarkan rekomendasi subjek dan informan yang bersedia diwawancarai. Peneliti menemukan UMKM yang berhasil menjadi binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ibu AW menjelaskan dari tahun 2017 hingga saat ini serta banyak manfaat yang telah dirasakan setelah menjadi binaan seperti dari awalnya alat yang mereka gunakan untuk mengolah makanan khas daerah secara manual hingga menggunakan peralatan mesin.

b. Derajat Perubahan

Derajat perubahan yaitu *output* berupa harapan yang diinginkan. Perubahan yang diharapkan oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksana pemberian bantuan teknis kepada UMKM yang telah mendapat pembinaan peneliti mendapatkan data dokumen output berupa:

- 1) Ada peningkatan kualitas produk.
- 2) Perluasan pasar.
- 3) Peningkatan tenaga kerja.
- 4) Ada dukungan kebijakan dari pemerintah/instansi terkait.

5) Bank terkait untuk membiayai.

Data diatas peneliti mencoba untuk mengaitkan dengan wawancara subjek AD bahwa setelah mendapatkan pembinaan harapannya UMKM memiliki skill dan keterampilan serta mamapu menguasai teknologi, sehingga kualitas yang diperoleh semakin bagus. Setelah itu hasil pendapatan akan meningkat, terjadi perluasan usaha baik itu pasar maupun lahan. Hasil yang dirasakan juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar seperti perekonomian menguat dan perkonomian daerah meningkat, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang luas.

UMKM yang berhasil setelah mendapat bantuan teknis akan dilepas tidak lagi menjadi binaan. Selanjutnya diserahkan kembali ke-pemerintah daerah untuk diawasi dan dibimbing sehingga harapannya dapat menjadi percontohan untuk mengembangkan UMKM lainnya. Kemudian untuk memperkuat modal usaha KPw Bank Indonesia Prov-Kalteng menghadirkan perbankan umum untuk berkoordinasi bahawa terdapat beberapa UMKM binaan yang siap dibiayai. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kewajiban perbankan umum untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% yang kemudian dapat dirasakan oleh pelaku uasaha lainnya.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan informan AW selaku UMKM binaan di Kota Palangka Raya peneliti mendapatkan,

kelompok usaha mereka mengalami kemajuan dari segi produksi meningkat dan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menarik daya beli masyarakat, dalam pendistribusian produk juga terjadi perluasan pasar, akses pemenuhan syarat legalitas juga terpenuhi hingga saat ini juga dalam proses pengajuan bantuan sarana dan prasarana. Namun dari beberapa pelatihan yang diberikan berupa pemasaran secara *online* melalui *e-marketing* belum dapat dijalankan dengan maksimal sebab terkendala dari SDM yang kurang dan optimalisasi waktu yang kurang. Sedang untuk akses keuangan kelompok usaha tersebut belum meminta atau mengajukan kepada perbankan umum sebab besarnya pengeluaran dari pada pendapatan yang ditakutkan tidak mampu dalam melakukan pembiayaan.

Peneliti juga mencari informasi tambahan UMKM di Kota Palangka Raya yang pernah mendapatkan bantuan. Salah satunya bapak ST yang bersedia diwawancarai. Bapak ST menjelaskan pernah mengikuti pelatihan atau *workshop* UMKM *go digital* yang pernah diadakan oleh KPw Bank Indonesia Prov-Kalteng. Banyak ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan dalam mengembangkan usaha kerajinannya. Akan tetapi setelah mengikuti pelatihan tersebut beberapa ilmu yang di dapatkan seperti berjualan di Toko Pedia merasa kurang diaplikasikan sebab adanya kendala seperti kurangnya pemasukan dan ketelatenan yang harus ditekuni. Sama seperti subjek AB jelaskan bahwa dari pemberian bantuan teknis

seperti pelatihan itu sendiri dalam memahami dan mengaplikasikan kembali kepada pelaku usaha masing-masing.

Jika dikaitkan Bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM merupakan unsur tolong-menolong yang sesuai sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط⁹⁵

Artinya:.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan tentang tolong-menolong dalam ketakwaan adalah penegak agama. Karena sikap tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Peneliti menganalisis bantuan teknis yang diberikan oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah perubahannya dapat dirasakan oleh pelaku usaha seperti peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja dan lain-lain.

Perekonomian yang meningkat untuk para pelaku usaha dapat memenuhi tuntutan seorang muslim yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal dan

⁹⁵Shabbani Shodaq E. Kusman, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5(lima)*, Bandung:Cordoba, 2020, h. 285.

mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, serta menjaga tangan agar berada diatas. Dari segi kualitas pelaku usaha menjadi lebih giat, terampil dan siap menghadapi persaingan.

c. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program merupakan tahapan implementasi yang sangat penting untuk diperhatikan. Pelaksanaan bantuan teknis diberikan langsung oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat bekerja sama dengan tenaga ahli maupun partisipan. Kemudian dari hasil wawancara dengan subjek AD dikarenakan tugas Bank Indonesia menjaga inflasi di Kalimantan Tengah dalam memilih UMKM yang mendapat bantuan terdapat dua kategori yaitu UMKM ketahanan pangan seperti petani dan UMKM non ketahanan pangan seperti pengerajin rotan atau pengolah makanan khas daerah.

Berkaitan dengan rumusan masalah kedua implementasi bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM yang berada di Kota Palangka Raya, berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek dan tambahan informan bentuk program bantuan teknis adalah penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, pendampingan/bimbingan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh unit Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM (FPPU) di KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah melakukan wawancara peneliti mendapatkan data dokumen tentang aspek Bank Indonesia dalam memberikan bantuan teknis kepada UMKM berupa:

- 1) Aspek pemasaran
- 2) Aspek produksi
- 3) Aspek manajemen
- 4) Aspek keuangan
- 5) Aspek sosial ekonomi dan lingkungan

Peneliti kembali menguatkan data diatas dengan informan AW selaku UMKM binaan yang menerima bantuan dapat dianalisis telah sesuai dengan data yang peneliti peroleh. Dilihat dari aspek pemasaran pihak UMKM diajarkan dalam pelatihan tentang pemasaran baik dari *offline* maupun *online* menggunakan *marketplace*. Kemudian aspek produksi meningkat, dan memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bersaing dengan produk yang lain. Segi manajemen UMKM ibu AW ini merupakan kelompok usaha yang bergerak dibidang olahan ikan yang terdiri dari berbagai bentuk usaha individu. Setelah mendapatkan bantuan dapat mendirikan kelompok dengan struktur manajemen yang jelas. Dengan begitu dari kelompok usaha ini dapat meningkatkan perekonomian di lingkungan sekitar pelaku usaha.

Selanjutnya saat pemberian bantuan teknis berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga subjek terdapat tahapan-tahapan yang

dilakukan. Pertama, KPw BI Provinsi Prov-Kalteng berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menerima usulan UMKM yang siap dibantu. Kedua, KPw BI Provinsi Prov-Kalteng melakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia serta melihat UMKM yang paling berpotensi dan wilayah yang strategis dari sumberdaya yang dibutuhkan untuk dibantu. Ketiga, dilakukan monitoring kepada UMKM yang akan di bantu apakah sesuai dengan keadaan. Keempat, pemberian bantuan teknis kepada UMKM setelah melakukan monitoring. Bentuk bantuan yang akan di berikan disesuaikan kebutuhan UMKM setelah dilakukannya monitoring.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menguatkan dengan data dokumen yang diperoleh, berupa faktor-faktor penentu klaster dalam pemberian bantuan yaitu:

- 1) Faktor kondisi input (*input condition*)
- 2) Faktor permintaan (*demand condition*)
- 3) Faktor industri pendukung terkait (*related and supporting industries*)
- 4) Faktor strategi perusahaan dan pesaing (*context for firm and strategy*)
- 5) Faktor modal sosial (*social capital*)

Adapun kriteria UMKM yang ditentukan oleh KPw BI Provinsi Prov-Kalteng untuk syarat mendapatkan bantuan teknis berdasarkan

hasil wawancara dengan subjek AB berupa, UMKM harus memiliki kelompok sehingga tidak individu, produk yang dihasilkan atau yang diolah berbentuk *volatiles food* dan khas daerah usaha yang mendorong perekonomian daerah. Hal serupa sama dengan hasil wawancara subjek AD namun sedikit tambahan yaitu kelompok UMKM sudah terdaftar di dinas terkait, sehingga lebih diutamakan UMKM yang telah disarankan atau yang sudah terdaftar. Namun, UMKM yang belum terdaftar di dinas sudah aktif berjalan secara berkelompok serta mau berkomitmen untuk berkembang bersama, akan diberikan arahan dan saran oleh KPw BI Provinsi Prov-Kalteng untuk memenuhi persyaratan bantuan teknis.

Peneliti juga mendapatkan data dari KPw BI Provinsi Prov-Kalteng yang berkaitan dengan kriteria UMKM untuk mendapatkan Bantuan Teknis sebagai berikut:

- 1) Diutamakan klaster komoditi unggulan
- 2) Diutamakan pasar berorientasi ekspor
- 3) Ada UMKM yang menjadi *local champion* (menjadi pionir)
- 4) Diutamakan klaster menyerap tenaga kerja
- 5) Klaster yang menjadi prioritas/ telah mendapat binaan dari Pemda dan atau dukungan dari lembaga lain

Hasil dokumentasi diatas jika dikaitkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang selalu mengaitkan antara kejayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat di pengaruhi oleh moral para

pengusaha dalam menjalankan bisnis yang terdapat dalam surat *Al-Israa'* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas berisikan sikap jujur dan adil dalam berbisnis. Sehingga peneliti dapat menganalisis dari hasil wawancara ketiga subjek datas dan mengacu data yang diperoleh, pemberian bantuan teknis sudah memiliki kriteria tersendiri dengan menyaring UMKM yang sesuai dan pantas mendapatkan bantuan.

Seperti memiliki komoditi unggulan sehingga dapat mengangkat ciri khas daerah masing-masing, menyerap tenaga kerja dalam artian usaha yang di kembangkan besar sehingga bantuan teknis dapat memudahkan usaha yang hasilnya dapat dirasakan oleh orang banyak dan lain lain dari kriterianya. Sedangkan untuk UMKM yang berorientasi ekspor di Kota Palangka Raya sendiri belum ada. Sehingga tidak terdapat UMKM yang berorientasi ekspor yang sudah dibantu oleh KPw BI Provinsi Prov. Kal-Teng.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Bantuan Teknis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Bantuan teknis KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Penelitian, pelatihan, pemberian Bimbingan/pendampingan, Bantuan Fasilitasi.
2. Implementasi Bantuan Teknsi KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Melalui tahapan pertama, pengeluaran kebijakan pemberian bantuan teknis kewajiban Bank Indonesia yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Tahapan kedua melalui derjat perubahan yang diinginkan yaitu *output* berupa harapan yang diinginkan oleh KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah setelah UMKM mendapatkan bantuan teknis berupa ada peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja, dukungan kebijakan dari pemerintah/instansi terkait dan perbankan untuk membiayai. Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan program Bantuan teknis dari mencari UMKM dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditentukan, kemudian menseleksi UMKM yang paling

berpotensi serta dapat dilakukan monitoring, kemudian selanjutnya pemberian bantuan teknis akan sesuai dengan kebutuhan UMKM binaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang perlu dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan teknis merupakan harapan bagi UMKM Kota Palangka Raya yang memiliki potensi untuk dibina, sehingga perlunya sosialisai untuk mengenalkan lebih luas bantuan teknis kepada pelaku Usaha UMKM di Kota Palangka Raya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan umum untuk pemberian pelatihan dan informasi terkait UMKM, sehingga dalam peran pembiayaan mikro UMKM perbankan dapat lebih meningkat
3. Dalam melaksanakan monitoring atau pada kegiatan lainnya kepada UMKM binaan di bidang non ketahanan pangan Kota Palangka Raya Bank Indonesia saranya dapat bekerjasama dengan binaan lainnya seperti Generasi Baru Indonesia (GenBI) dari generasi milenial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz, Abdul dan A. Herani Rusalan *Peranan Bank Indonesia Di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebank Sentralan PPSK BI 2009.
- Amin, Safwan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014.
- Agung, Dr. Anak Agung Putu *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press 2012.
- Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi* Jakarta: Renika Cipta 2005.
- Arianto, Yusuf CK, *Rahasia dapat modal dan fasilitas dengan Cepat dan Tepat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2011
- Amir, Supriadi, *Cara Gampang Mendapatkan Modal Dan Fasilitas*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas 2014.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2008.
- Budiarto,Rachmawan, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2015.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Endah, S.H. Nilla *Mengenal Sejarah Bank Di Indonesia*. Kartasuro, Sukaharjo: CV Graha Printama Selaras 2016
- Ghafur, Abdul S.H., M.H *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press 2009.
- Hutahean, Jeperson, *Konsep Sitem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismanto, Hadi dkk. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish 2019.
- Ismail, Drs. *Perbankan Syariah*, Jakarta: kecana 2016.

- Kurnia, Siwi, Prof. Dr. Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, S.Pd., M.M, Menik, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana 2016.
- Luthfiah, M.Ag, Muh. Fitrah, M.Pd., dan Dr. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak 2017.
- Nasution, Rozaini, *Teknik Sampling*, Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Rohman, Arif *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Aswaja 7Pressindo 2014.
- Setiawan, Albi Anggito dan Jhohan S.Pd, *Metodologi penelitian Kulaitatif*, Sukabumi: CV Jejak 2018.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2004.
- Sugiana, Puji Melita, *Imlementasi Kebijakan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia 2012.
- Sulilah, Dr. Ismet, SE., M.Si, *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish,2015.
- Santoso, Budi, *Skema dan Mekanisme Pelatihan Panduan Pelatihan*, Jakarta: Yayasan Terumbu Karang.
- Suandi, Basroei dan, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rineka Cipta, 2008.
- Toroni, Imam Suprayogo dan, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2003.
- Uliya, Marfuatun, *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Relasi Inti Media 2017.
- Widi, Restu Kartika, *Enggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish Publisher 2018.
- Yusuf, Muhammad Yasir, *Islamic corporate social responsibility (I-CSR) pada lembaga Keuangan syariah (LKS): teori dan praktek*, Jakarta: kencana 2017.

B. Laporan majalah

Laporan Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, Edisi Desember, Badan Pusan Statistik, 2019.

Laporan Tahunan Annual Report, Bank Indonesia, 2016.

Laporan Tahunan, Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan, Bank Indonesia, 2018.

Mendukung Pengendalian Inflasi, Bank Indonesia, 2017.

Profil bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM kerja sama LPII dengan Bank Indonesia 2015.

C. Skripsi

Helwiyani Maulida “*Peran Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2014. Skripsi.

Amalia Ananda. “*Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatra Utara*”, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2018. Skripsi.

Aliyah Khairunnisa. “*Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosila bank Indonesia (PSBI) kantor Perwakilan Bank Indonesia*”, Palangka Raya 2018. Skripsi.

D. Jurnal Nasional

Jurnal Dwijayanti, mansoni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah*, Jurnal SIKAP Vol 3 No 201.

Booklet Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Edisi 1 2014 issn 1858-4233.

E. Internet

Indar, “Data Terbaru UMKM di Kalimantan Tengah mencapai 39 Ribu” http://kaltengpos.co/bertita/-35392/Data_Terbaru_Pelaku_UMKM_di_Kalteng_Mencapai_39_Ribu.html diakses pada 28 Januari 2020.

Muhammad Arif Hidayat, *Pelaku UMKM Memiliki Peran Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kalteng*, <http://diskopukm.kalteng.go.id/berita/detail/pelaku-umkm-miliki-peran->

strategis-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kalteng diakses pada 26 Januari 2020.

Tugas dan Tujuan Bank Indoensia, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses pada 14 Februari 2020.

“Sekapur Sirih Gubernur Bank Indonesia”, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses pada 15 Februari 2020.

